

UP FOR GRABS

Deforestasi dan Eksploitasi
dalam Meledaknya Pembangunan Perkebunan di Papua



UCAPAN TERIMA KASIH

Telapak/EIA menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Rufford Maurice Laing dan Yayasan Body Shop atas dukungan yang diberikan. Telapak dan EIA juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kelompok-kelompok komunitas, LSM dan perorangan di Papua yang turut memberikan sumbangsinya dalam penyusunan laporan ini.
This report was written and edited by the Environmental Investigation Agency and Telapak.

Laporan ini ditulis dan disunting oleh Telapak dan Environmental Investigation Agency.

Desain laporan oleh:
www.designsolutions.me.uk

Printed on recycled paper

November 2009

ISBN: 0-9540768-8-5



ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street, London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



TELAPAK

Jalan Pajajaran No. 54, Bogor, Indonesia
Tel: +62 251 393 245 / 715 9909
Fax: +62 251 393 246
email: telapak@telapak.org

www.telapak.org

SAMPUL DEPAN:

Kelapa Sawit Menggantikan Hutan di Modan, Sorong, Papua Barat, April 2009.
Perkebunan Kelapa Sawit ini tidak memiliki izin-izin yang terkait.

© EIA/Telapak

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN

2 PAPUA - HUTAN YANG TERAKHIR

10 MELEDAKNYA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI PAPUA

22 HUTAN UNTUK RAKYAT

24 REKOMENDASI

25 RUJUKAN

TERMINOLOGI

Dalam laporan ini istilah Papua mengacu pada bagian wilayah Indonesia dari pulau New Guinea. Istilah Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat mengacu pada kedua propinsi yang membentuk Papua. Istilah distrik mengacu pada pemerintahan setempat atau kabupaten, yaitu unit pemerintahan lokal yang membentuk sebuah propinsi.

Istilah yang terkait dengan luas area:

1 Hektar (ha) = 2.47 Acres / 10,000 m² / 0.01Km² / 0.0038 Mil Persegi. Sebagai gambaran, areal dengan luas 30.000 hektar itu setara dengan luas Malta, 300.000 hektar kira-kira hampir tiga kali luas Hong Kong dan 1 juta hektar kira-kira sama dengan luas Cyprus.





PENDAHULUAN

© EIA/Telapak, April 2009

Hutan-hutan Papua yang unik saat ini dikecupung oleh perkebunan-perkebunan yang makin lama makin luas. Lebih dari lima juta hektar lahan telah ditargetkan untuk dikonversi menjadi kebun kelapa sawit, dimana perkiraan permintaan bahan bakar nabati (biofuels) sedunia menjadi salah satu sebab yang mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan ini.

Yang menjadi taruhan di sini adalah nasib dari hutan-hutan alam tropis yang terakhir di kawasan Asia – Pasifik. Hutan-hutan Papua adalah rumah bagi suatu keragaman hayati yang amat mengagumkan dan juga merupakan sumber mata-pencarian bagi masyarakat di sekitarnya dan merupakan sarana penyimpan karbon yang penting.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa perkembangan perkebunan di Papua dilakukan sebagai upaya untuk membangun Papua dan sebagai sebuah cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuels). Tetapi apabila diteliti secara mendalam, pernyataan-pernyataan ini tidaklah sepenuhnya benar.

Fakta yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan oleh Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA), menunjukkan bahwa penduduk asli Papua yang tidak siap berulang kali dibujuk, ditipu atau bahkan ditekan untuk menyerahkan hak ulayat mereka atas sejumlah besar lahan hutan kepada para konglomerat yang berkuasa yang didukung oleh investor asing dan difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Pengelolaan sektor perkebunan di Papua kacau balau. Pengaturan kerjasama antar instansi dari berbagai tingkatan dan instansi pemerintah tidak jelas, hal ini juga diperparah dengan tidak adanya transparansi, sehingga terciptalah daerah abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh para pemilik perkebunan. Saat ini hampir tidak mungkin mendapatkan data yang dapat dipercaya dari pemerintah mengenai izin-izin yang telah diberikan kepada perusahaan yang mana. Di beberapa daerah ditemui perusahaan perkebunan yang sudah beroperasi meskipun izin yang diperlukan belum selesai diurus.

Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa perundingan antara pemilik hak ulayat dan perusahaan perkebunan tidaklah berlangsung sebagaimana layaknya yaitu di antara dua pihak yang setara dan seringkali bersifat eksploitatif. Janji-janji akan manfaat yang akan diberikan seperti membangun sekolah, penyediaan listrik dan membangun perumahan jarang ditepati. Ganti rugi yang diberikan untuk lahan dan kayu sering tidak memadai. Anak-anak, bahkan yang baru berumur sekitar empat tahun diharuskan menandatangani kontrak, sehingga perusahaan dapat menguasai lahan sampai puluhan tahun. Hanya para konglomerat yang kuat dan investor asing, dan bukan rakyat Papua yang akan meraih keuntungan dari perluasan perkebunan secara besar-besaran ini.

Pendapat bahwa rencana penambahan produksi kelapa sawit untuk bahan bakar nabati (biofuels) akan dapat membantu mengatasi dampak perubahan iklim sangat menyesatkan. Pembalakan hutan-hutan di Papua dalam skala besar seperti yang direncanakan justru akan menimbulkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih besar dari manfaat yang akan didapat dari penggunaan bahan bakar nabati (biofuels).

Pemerintah Indonesia boleh dipuji karena mengambil tindakan-tindakan yang tegas dalam usahanya mengatasi pembalakan liar dalam beberapa tahun terakhir. Pembalakan liar yang meraja-lela di Papua sempat tertahan oleh operasi penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2005. Penertiban semacam ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi kebijakan Pemerintah terkait dengan perkebunan justru merupakan ancaman yang lebih besar bagi hutan-hutan Papua dibandingkan Pembalakan liar.

Pengkajian terkait sektor perkebunan di Papua sangat diperlukan, dan pembentukan kebijakan yang dapat melindungi kebutuhan komunitas lokal dan melindungi hutan-hutan yang masih tersisa dan bukannya kebijakan penguasaan lahan hutan yang merusak.

ATAS:

Hutan yang direncanakan akan dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. Matoa Rimba Lestari di Kabupaten Urunum Guay, Propinsi Papua, September 2009.

PAPUA – HUTAN TERAKHIR

ABOVE:

Forest slated for conversion to oil palm for PT. Matoa Rimba Lestari's plantation in Urinum Guay District, Papua Province, September 2009.

Hutan-hutan Papua yang unik merupakan bagian terakhir dari jalur hutan-hutan tropis yang masih utuh diseluruh kawasan Asia-Pasifik dan merupakan hutan alam tropis terbesar ketiga di dunia setelah hutan-hutan Amazon dan hutan-hutan Lembah Sungai Congo. Oleh karena itu hutan-hutan Papua secara global dianggap sebagai sesuatu yang penting.

Di masa lalu hutan-hutan Indonesia terangkai dari ujung pulau Sumatra di sebelah barat sampai Papua di timur. Tetapi deforestasi yang tak terkendali dalam dua dasawarsa terakhir telah menghancurkan hutan-hutan ini melalui pembalakan liar dalam skala yang besar, Penebangan yang telah disahkan oleh instansi terkait, tetapi tidak mengindahkan prinsip kelestarian (kesinambungan) dan perluasan yang cepat dari perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Nasib yang menimpa hutan-hutan Indonesia telah dijuluki sebagai kejahatan lingkungan dalam skala raksasa. Telapak/EIA telah mendokumentasikan bagaimana hutan Sumatra dan Kalimantan yang tadinya begitu luas telah dirampas oleh penebangan-penebangan yang rakus dan para pemilik perkebunan yang didukung oleh pejabat-pejabat polisi, militer dan pejabat pemerintah yang korup, dan eksploitasi pada saat ini telah bergeser ke Propinsi Papua dan Papua Barat.

Hutan Papua merupakan kediaman keanekaragaman hayati yang unik, kira-kira 60% dari yang dapat ditemui di daerah manapun di Indonesia.¹ Belum lama ini, beberapa pakar telah menyebut hutan-hutan ini sebagai "taman firdaus", setelah beberapa tim peneliti internasional menemukan sejumlah spesies baru yang belum dikenal oleh ilmu (sains) dan dunia. Hutan-hutan ini juga merupakan rumah bagi lebih dari 250 suku yang berbeda, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki keragaman dalam hal budaya dan bahasa, seperti halnya suku dan bangsa lainnya di dunia. Komunitas masyarakat ini telah mengelola hutan-hutan ini dari generasi ke

generasi secara turun temurun, terutama karena hidup-mati mereka terkait dengan hutan dan Sumber Daya Hutan. Hutan-hutan Papua juga mengandung jutaan ton karbon. Walaupun demikian, keunikan hutan Papua makin lama makin terancam oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang bermaksud mengkonversi jutaan hektar hutan menjadi perkebunan monokultur yang mendorong terjadinya perampasan lahan secara besar-besaran oleh beberapa konglomerat yang didukung oleh investor asing yang tidak jelas asal usulnya.

HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM

Ketika perhatian dunia semakin terpusat pada ancaman yang disebabkan oleh perubahan iklim, maka semakin tampaklah betapa pentingnya upaya untuk melindungi hutan-hutan dunia. Hutan-hutan menangkap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar dari atmosfer, sementara emisi karbon yang diakibatkan oleh penggundulan dan perubahan fungsi hutan pada saat ini menghasilkan 20 persen dari emisi karbon global. Pada tahun 2000, deforestasi diseluruh dunia menghasilkan emisi karbon dioksida (CO₂) sebesar delapan milyar ton.² Saat ini para ahli sepakat bahwa segala upaya untuk membatasi kenaikan suhu yang berbahaya tidak akan berhasil apabila deforestasi terus berlangsung dalam tingkat seperti sekarang ini.

Indonesia adalah contoh utama dari dinamika ini. Tingkat deforestasi di Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, rata-rata dua juta hektar per tahun pada paruh awal dasawarsa ini, negeri ini mempunyai tingkat emisi CO₂ terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat. Hampir 75 persen dari emisi ini diakibatkan oleh deforestasi. Pada tahun 2007, hilangnya hutan dan perubahan fungsi hutan di Indonesia menyebabkan emisi CO₂ sebesar 2,56 milyar ton – hampir 32 persen dari emisi global berasal dari sumber-sumber ini.³



© EIA/Telepak



© EIA/Telepak

ABOVE AND LEFT: Burning forests for oil palm plantations, as in Samarinda, East Kalimantan (pictured), has resulted in Indonesia becoming the third largest source of carbon emissions, with 75% stemming from deforestation. Demand for biofuels is hastening such deforestation in Papua.

Penelitian-penelitian terakhir menunjukkan bahwa Indonesia amat rentan pada dampak yang mungkin timbul dari perubahan iklim. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) memperkirakan bahwa negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia akan menderita dampak yang lebih buruk dari perubahan iklim dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di dunia, lebih lanjut ADB juga memperkirakan bahwa tindakan yang tidak diambil oleh Indonesia dapat mengakibatkan biaya yang harus ditanggung mencapai 6,7 persen dari PDB pada tahun 2100, dibanding biaya yang ditanggung negara-negara lain yaitu sekitar 2,6 persen dari PDB mereka.⁴ Dalam ruang lingkup negara-negara Asia Tenggara, Pulau Jawa di Indonesia, termasuk yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti longsor, banjir dan bencana kekeringan, dan ibukota negara di Jakarta juga rentan terhadap risiko-risiko ini.⁵

KONTRADIKSI BAHAN BAKAR NABATI

Bukannya mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi deforestasi dan melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan lebih baik, pemerintah Indonesia malah mendorong terbentuknya perkebunan berskala industri yang hampir dapat dipastikan hanya akan menciptakan emisi yang lebih besar. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kebijakan ini didorong oleh adanya perkiraan bahwa permintaan bahan bakar nabati (biofuels) akan meningkat, hal

ini memang sering didengungkan oleh komunitas internasional sebagai dasar dari sebuah energi “hijau” yang terbarukan. Indonesia ingin turut meneguk keuntungan dari permintaan yang baru ini, dan para investor berbondong-bondong untuk mendapatkan kapling lahan untuk memproduksi “emas-hijau” yaitu sebutan yang umum digunakan untuk menyebut kelapa sawit dan tanaman sejenisnya. Pada kenyataannya, target yang ditetapkan oleh Indonesia yang menyebutkan bahwa lima persen dari konsumsi bahan bakar domestik pada 2025, akan memerlukan sekitar 1,4 juta hektar lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.⁶ Untuk dapat menghasilkan jumlah yang signifikan untuk memenuhi perkiraan permintaan global akan kelapa sawit dan sumber daya bahan bakar nabati (biofuels) lainnya, seperti yang direncanakan oleh Indonesia, akan meningkatkan luas areal hutan yang akan dialih-fungsikan sebagai perkebunan.

Sebuah laporan yang dibuat oleh United Nations Environment Programme (UNEP) pada bulan Oktober 2009 menyebutkan : “95 persen dari peningkatan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia didorong oleh meningkatnya permintaan akan biodiesel”, dan dua pertiga dari peningkatan budi daya kelapa sawit di Indonesia diperoleh dari alih fungsi hutan tropis”. UNEP menyimpulkan sebagai berikut : “Apabila kecenderungan ini terus berlanjut maka pada tahun 2030 jumlah areal hutan tropis di Indonesia akan berkurang sampai

DAMPAK IKLIM DARI MINYAK KELAPA SAWIT

Penelitian terakhir menunjukkan bahwa mengubah fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi bahan bakar nabati akan memperburuk dampak dari perubahan iklim. Sebuah penelitian awal di Sumatra dan Kalimantan mempelajari dampak dari pembukaan hutan, budi-daya kelapa sawit dan proses pengolahannya, dibandingkan dengan potensi manfaat iklim dari bahan bakar nabati yang dihasilkan. Minyak kelapa sawit dapat menyimpan kurang dari 40 ton biomas sepanjang umurnya yang mencapai 25 tahun, hutan yang ditebang dapat menyimpan sekitar 70-200 ton karbon per Hektar. Hutan yang tidak disentuh dapat menyimpan lebih banyak lagi, pada keadaan tertentu dapat mencapai lebih dari 400 ton per Hektar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembukaan hutan bekas tebangan untuk dialihkan sebagai perkebunan kelapa sawit akan menghasilkan lebih banyak karbon – emisi gas rumah kaca yang dihasilkan akan lebih banyak dibanding yang dihindarkan. Rekomendasinya adalah membatasi alih fungsi hutan untuk perkebunan kelapa sawit, yaitu hanya pada lahan-lahan yang menyimpan kurang dari 40 ton karbon per hektar; contohnya lahan yang ditumbuhi semak belukar atau padang rumput.⁹

29% dibanding areal pada tahun 2005 dan hanya mencakup 49% dari jumlah areal hutan tropis yang tercatat pada tahun 1990”.⁷

Dewan Perubahan Iklim Nasional Indonesia mengakui bahwa emisi karbon negeri ini akan meningkat dua persen per tahun, sehingga mencapai 3,6 gigaton pada tahun 2030, dan badan ini telah merekomendasikan untuk menghentikan deforestasi untuk menghindari peningkatan ini.⁸ Walaupun demikian, pemerintah Indonesia masih bersikukuh bahwa peningkatan produksi bahan bakar nabati (biofuels) tidak berarti deforestasi. Dalam sebuah pertemuan umum di Jakarta pada tahun 2007 untuk mendiskusikan temuan Stern Review on the Economics of Climate Change, Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan menyatakan : “Terkait dengan masalah bahan bakar nabati (biofuels), pemerintah akan menggunakan lahan yang sudah dikonversi atau lahan kosong. Pemerintah tidak akan menggunakan hutan alam”. Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar juga sependapat. Beliau menyatakan bahwa “Indonesia tidak akan mengorbankan satu pohonpun demi mengembangkan perkebunan bahan bakar nabati”. Sayangnya pernyataan-pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan seperti yang dapat disaksikan di Papua.

POLITIK DAN KEHUTANAN DI PAPUA

Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia menetapkan status otonomi khusus untuk Papua, hal ini dilakukan sebagai alternatif dari tuntutan kemerdekaan yang berlarut-larut yang telah menyebabkan perpecahan antara kedua pihak selama beberapa dasawarsa. Tetapi meskipun kebijakan yang progresif ini telah diberlakukan, laporan-laporan mengenai konflik terus terdengar termasuk peningkatan militerisasi dan larangan bagi wartawan asing untuk meliput berita-berita terkait dengan Papua.

Sesuai dengan semangat yang termaktub dalam otonomi khusus, Pemerintah Propinsi dapat secara tegas melindungi hak-hak dari masyarakat asli Papua untuk memiliki dan mengelola lahan mereka. Tetapi hal ini masih belum terlaksana. Peraturan yang penting – Perdasi dan Perdasus – yang dibutuhkan untuk menterjemahkan semangat otonomi khusus menjadi sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat Papua masih belum dilaksanakan secara efektif, meskipun delapan tahun telah berlalu sejak diundangkannya undang-undang otonomi. Dalam kekosongan ini, terlihat bahwa Sumber-sumber Daya Alam Papua masih dikuasai oleh pihak-pihak luar.

Beragam badan dan instansi pada tingkat Daerah, Propinsi dan Nasional yang sekarang saling tumpang tindih dalam mengatur hutan dan sumber-sumber daya alam Papua, termasuk pengembangan perkebunannya. Buruknya komunikasi antar instansi-instansi ini, ditambah dengan birokrat yang tidak berpengalaman korupsi maka hasilnya adalah kerangka kerja yang mengatur sektor perkebunan di Papua menjadi rusuh, kacau balau dan tidak transparan.

Tidak adanya peraturan yang jelas yang mengatur penggunaan lahan dan hutan telah menimbulkan semacam lubang hitam dalam bidang hukum yang dapat dieksploitasi oleh para investor dan pihak-pihak yang memiliki

BELOW:

People’s Representative Council, Jayapura, Papua Province. Unclear regulations on land use and forestry under special autonomy have produced a legal black hole easily exploited by investors and political interests.



kepentingan politik di Papua. Untuk menanggapi hal ini, pada bulan Juni 2008 koalisi utama LSM di Papua, Foker LSM Papua, bersama dengan Telapak/EIA menyerukan penghentian semua perijinan/kontrak baru di bidang kehutanan dan perkebunan sampai Perdasu dan Perdasus tentang kehutanan, kepemilikan lahan dan sumber daya alam dilaksanakan sehingga dapat melindungi hak dan kepentingan masyarakat asli Papua.¹⁰ Walaupun demikian perijinan, kontrak dan perampasan lahan terus berlanjut.

PEMBALAKAN LIAR DI PAPUA

Indonesia mempunyai rekam jejak yang buruk terkait dengan pengelolaan hutan dan pembalakan liar yang tak terkendali.¹¹ Dengan musnahnya hutan-hutan di Sumatra dan Kalimantan sebagai akibat produksi yang melebihi jatah tebang (over production), pembalakan liar dan korupsi, maka para konglomerat usaha perikanan yang kadang tak tersentuh oleh hukum ini, mulai mengalihkan perhatian mereka ke Papua.

Antara tahun 2000 dan 2005 kegiatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu gelondongan, khususnya kayu merbau di Papua telah mengakibatkan mengalirnya secara bebas tanpa hambatan sekitar 300.000 meter kubik kayu ke Cina sebagai bahan baku untuk industri flooring. Ini adalah sebuah operasi ilegal dengan omzet sekitar satu milyar dolar setahun yang dikoordinasikan oleh sindikat kriminal internasional yang difasilitasi oleh pejabat dan aparat keamanan pada tingkat tinggi yang korup. Di Indonesia ketersediaan kayu merbau pada skala komersial hanya dapat ditemui di Papua. Orang Papua dirampok secara terang-terangan, mereka hanya menerima US\$ 10 untuk kayu gelondongan yang di Cina dijual ke pabrik dengan harga US\$ 250 dan setelah diolah dijual sebagai penutup lantai (flooring) dengan harga US\$ 2.288 di negara-negara Uni Eropa. Pejabat militer yang korup menerima sekitar US\$ 50 per meter kubik untuk memastikan agar

pengiriman kayu gelondongan yang ilegal ini tidak dihilangi.¹²

Harus diakui bahwa Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melancarkan operasi pemberantasan pembalakan liar yang efektif pada tahun 2005, tetapi tidak ada satupun pemain utamanya yang berhasil dihukum. Alih-alih mengejar para kriminal, pemerintah malah mencabut hampir semua ijin pengelolaan kayu masyarakat. Sebuah penelitian mengenai sektor kehutanan di Papua mengungkapkan bahwa masyarakat lokal di Papua menerima kurang dari lima persen dari nilai keseluruhan industri perikanan di Papua yang mencapai US\$ 400 juta.¹³

Sejak tahun 2005 pemerintah Propinsi Papua telah berusaha mendorong terlaksananya sejumlah langkah yang dirancang untuk mengalirkan manfaat dari hutan-hutan Papua kepada masyarakat Papua, termasuk diantaranya larangan untuk mengirimkan kayu gelondongan keluar dari Papua untuk mendorong pertumbuhan industri pengolahan kayu di Papua. Gubernur Papua berjanji bahwa beliau akan “mengembalikan hutan kepada masyarakat” sesuai dengan undang-undang otonomi khusus yang terkait dengan kehutanan dan hak kepemilikan lahan.

Walaupun demikian kebijakan Pemerintah Pusat masih tetap mendorong penebangan kayu Merbau secara besar-besaran yang hanya memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat lokal Papua. Pada tahun 2008, menyusul laporan Telapak/EIA mengenai berlanjutnya penyelundupan kayu Merbau oleh pedagang Merbau, Menteri Perdagangan memberikan dispensasi khusus pada para penyelundup tersebut untuk menghindari peraturan ekspor untuk Merbau yang akhirnya melemahkan hukum mengenai ekspor Merbau, tetapi tidak untuk jenis kayu yang lain.¹⁴ Pada tahun 2008, 15 persen dari keseluruhan hasil kayu gelondongan Indonesia yang tercatat adalah kayu Merbau. Sepanjang tahun 2007 dan 2008, 31,4 persen dari total ekspor produk kayu Indonesia adalah kayu Merbau.¹⁵

BELOW:

Illegal merbau logs seized in 2005 are guarded by Kostrad Special Forces border troops prior to shipment from Haltekamp, Jayapura, Papua Province, in June 2007.





DARI PEMBALAKAN LIAR KE PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Beberapa dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkembang dengan pesat ternyata memiliki latar belakang bisnis yang meragukan. Sebagai contoh adalah Abdul Rasyid, mantan anggota MPR. Pada tahun 1999, Telapak/EIA mengungkapkan keterlibatan Rasyid dibalik pencurian yang sistematis dari kayu gelondongan yang sangat bernilai dari Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah.¹⁷ Kegiatan Rasyid membawanya masuk ke dalam daftar yang dibuat oleh Menteri Kehutanan sebagai salah satu bos pembalakan liar di Indonesia. Walaupun demikian Rasyid tidak pernah dihukum dan bahkan sekarang ia dikenal sebagai usahawan perkebunan kelapa sawit terkemuka. Melalui perusahaan kebun kelapa sawitnya, PT Citra Borneo Indah, Rasyid berhasil memperoleh kapling lahan sekitar 50.000 hektar di sekitar daerah kekuasaannya di Pangkalanbun di bagian selatan dari Kalimantan Tengah, yang diperkirakan akan bernilai sekitar US\$ 200 juta setelah berproduksi. Akuisisi lahan ini sebagian dibiayai oleh pinjaman dari Bank Negara Indonesia. Sampai saat ini Rasyid masih menimba keuntungan dari koneksi tingkat tingginya. Upacara peresmian pada salah satu lokasi perkebunannya dihadiri oleh Menteri Pertanian Anton Apriantono, tokoh media Surya Paloh dan Gubernur Kalimantan Tengah.¹⁸

Indonesia & Malaysia CPO Production & Trade 2000–2008

	2000	2005	2008
Indonesia			
Area Planted ('000 ha)	4,158	5,454	7,008
CPO Production ('000 tonnes)	7,001	11,862	18,090
CPO Exports ('000 tonnes)	4,110	10,376	14,650
Major Markets			
India:	1,639	901	
China:	438	493	
Netherlands:	593	383	
Malaysia			
Area Planted ('000 ha)	3,377	4,051	4,488
CPO Production ('000 tonnes)	10,842	14,962	17,734
CPO Exports ('000 tonnes)	8,140	13,192	15,300
Major Markets			
China:	1,009	2,882	
India:	1,946	1,147	
Netherlands:	489	1,239	
Pakistan:	1,025	890	

Sources:

- Production Figures: Ministry of Agriculture 2009; Malaysian Palm Oil Board 2009, cited in Palm Oil: The Sustainable Oil, World Growth, September 2009
- Trade Data: FAO & USDA

LEFT:

Untouchable timber criminals like Abdul Rasyid, left, are supported by the highest echelons of Indonesia's government when reinventing themselves as legitimate plantations operators.

DORONGAN UNTUK MELAKUKAN EKSPANSI PERKEBUNAN

Peningkatan harga minyak bumi secara secara tajam sejak 2005 mempengaruhi perekonomian Indonesia dalam dua hal. Di satu sisi, Presiden Yudhoyono terpaksa mengambil keputusan pahit yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan domestik, sementara pada saat yang bersamaan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) meroket. Sebagai akibatnya pada tahun 2006 dan 2007 ketika Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah konferensi Konvensi Kerangka Kerja Sama PBB Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) di Bali, pemerintah menggelontorkan sebuah program jangka panjang yang ambisius, yaitu ekspansi perkebunan yang fokus utamanya adalah pada perluasan perkebunan kelapa sawit, dan komponen utama dalam rencana ini adalah mengembangkan bahan bakar nabati (biofuels). Rencana ini mentargetkan perluasan perkebunan kelapa sawit dari enam juta menjadi dua puluh juta hektar.

Pada awal 2007 berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan rencana ini, antara lain Keputusan Presiden 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Instruksi Presiden 1/2006 tentang pasokan dan penggunaan bahan bakar nabati. Kedua putusan ini menetapkan target yang ambisius terkait dengan peningkatan kebutuhan konsumsi bahan bakar nabati domestik. Pemerintah juga memberlakukan sebuah undang-undang baru yang cukup penting yang dirancang untuk menarik lebih banyak lagi investor asing dan menginstruksikan Pemerintah Propinsi untuk mempermudah perizinan terkait dengan penggunaan lahan untuk perkebunan.¹⁶ Pada tahun yang sama, Indonesia akhirnya berhasil mencapai target yang ditetapkannya sendiri yaitu melampaui Malaysia sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Untuk mengakomodasi rencana pengembangan perkebunannya yang ambisius ini, Pemerintah Indonesia secara khusus memusatkan perhatiannya ke Papua, dengan cara memberlakukan berbagai undang-undang dan meluncurkan proyek-proyek besar untuk menarik minat para investor di bidang perkebunan. Peraturan Februari 2007 tentang proses perizinan perkebunan secara dramatis meningkatkan luas areal lahan yang boleh dieksploitasi oleh sebuah perusahaan perkebunan dalam sebuah propinsi dari luas semula 20.000 hektar menjadi 100.000 hektar, dengan

catatan tambahan yaitu “batas ukuran terluas untuk usaha perkebunan di propinsi Papua adalah dua kali lebih besar dari batas maksimum yang ditetapkan”.¹⁹ Dalam tahun yang sama juga, sebuah Instruksi Presiden tentang percepatan proses pembangunan di Papua juga diberlakukan.²⁰

Pada bulan Mei 2008, Direktur Jendral Perkebunan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia, menyatakan bahwa : “Karena pulau Sumatra dan Kalimantan sudah terlalu padat untuk perkebunan kelapa sawit baru, maka lahan yang masih tersedia adalah Papua”.²¹ Para pelaku usaha perkebunan yang mendengar pernyataan ini segera mengarahkan perhatian mereka ke hutan terakhir di Papua untuk melakukan ekspansi perkebunan mereka.

SUMBER DAYA ALAM DAN PEMBANGUNAN DI PAPUA - SIAPA YANG DIUNTUNGKAN?

Selain dikenal sebagai daerah dengan hutan terluas di kawasan Asia-Pasifik, Papua dikaruniai sumber kekayaan alam yang melimpah, termasuk kayu yang bernilai dalam jumlah besar, emas, tembaga, nikel, batu bara, gas dan sumber daya lainnya. Tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, PT Freeport Mc Moran, juga terletak di Papua Tengah dan perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar di Indonesia, pajak yang dibayarkannya pada tahun 2007 mencapai US\$ 1.7 milyar.

Tetapi walaupun kaya akan sumber daya alam, penduduk Papua jauh tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Indeks Sumber Daya Manusia (Human Development Index, HDI) di Propinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2005 adalah 62,1 dibandingkan daerah

lainnya di Indonesia yang memiliki indeks rata-rata 69,6.²²

Menurut pemerintah propinsi Papua, pada tahun 2007 sekitar 486.857 kepala keluarga atau sekitar 80 persen dari penduduk Papua masih tergolong miskin. Sebuah laporan dari Badan PBB untuk Program Pembangunan (United Nations Development Programme, UNDP) yang dikeluarkan tahun 2005, menyebutkan “Papua memiliki tingkat buta aksara pada orang dewasa tertinggi di Indonesia, sekitar 74,4 persen”. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa hanya 47 persen anak di Papua yang bersekolah sampai tingkat sekolah menengah pertama dan hanya 19 persen yang melanjutkan ke sekolah menengah atas.

Lebih jauh UNDP juga memperkirakan bahwa hanya ada satu dokter untuk setiap 2.000-23.000 orang, tergantung lokasi.²³ Mengingat kerentanan masyarakat Papua yang sangat tinggi terhadap HIV/AIDS, maka jelas kekurangan tenaga kesehatan ini merupakan masalah yang sangat serius. Tingkat penyebaran HIV/AIDS di Papua adalah nomor dua setelah ibukota Jakarta. Tanpa intervensi yang sungguh-sungguh maka tingkat penyebaran HIV/AIDS akan menjangkiti 7 persen dari keseluruhan populasi Papua pada tahun 2025, angka ini umumnya oleh para ahli dianggap sudah bersifat epidemi dan tidak terkendali.²⁴

Indeks Sumber Daya Manusia ini menggambarkan walaupun sumber-sumber daya alam Papua telah dieksploitasi selama beberapa dasawarsa, tetapi hanya sedikit manfaat yang dapat dinikmati oleh penduduk asli. Mengingat buruknya rekam jejak yang lalu, maka kecil kemungkinan masyarakat Papua akan ikut menikmati keuntungan dari perluasan perkebunan di daerah mereka.

Meskipun perluasan perkebunan kelapa sawit memang akan membuka lapangan

BELOW:

Despite the huge wealth generated from Papua's natural resources, only 47% of children attend junior secondary school, and merely 19% attend senior secondary school.



kerja baru, tetapi luasnya rencana ekspansi perkebunan yang direncanakan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dari yang tersedia di Papua. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Perencanaan Nasional, Paskah Suzetta, pada bulan Juli 2007, investasi dalam sektor perkebunan dan rencana pembangunan yang akan diterapkan di Papua berarti "akan lebih banyak lagi orang datang ke Papua, dan mereka bukan hanya datang dari Propinsi lain di Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain. Sehingga masyarakat Papua harus mempersiapkan diri".²⁵

Analisa yang dilakukan oleh Telapak/EIA menunjukkan jumlah lapangan kerja yang tercipta akibat ekspansi sektor perkebunan di Papua dapat berujung pada tersingkirkannya atau termajinalkannya penduduk asli Papua oleh jutaan pekerja migran yang datang ke Papua. Satu juta hektar kebun kelapa sawit membutuhkan sekitar 330.000 pekerja atau dua kali lebih besar dari 135.000 orang Papua yang belum mempunyai pekerjaan pada saat ini. Padahal pemerintah telah merencanakan setidaknya lima juta hektar kebun kelapa sawit, hal ini berarti sejumlah besar pekerja migran akan datang ke Papua, yang akhirnya akan berpotensi mengurangi proporsi etnis Papua dalam perhitungan populasi keseluruhan. Perubahan seperti ini sangat mungkin mengakibatkan marjinalisasi dan keterasingan masyarakat asli Papua di tanah mereka sendiri dan mungkin akan berujung pada konflik.

Sejarah korupsi yang sistematis di Indonesia secara tradisional menunjukkan bahwa kekayaan negeri ini sebagian besar dikuasai oleh para elit politik, pengusaha dan militer. Walaupun telah ada tindakan keras dari Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2005, penelitian yang belum lama dilakukan oleh Transparency International terkait dengan korupsi di sektor industri perkebunan menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pelaku usaha mengaku bahwa mereka secara teratur memberikan uang suap kepada pejabat pemerintah demi kelancaran

pengurusan perizinan usaha mereka.²⁶

Cara memperoleh penghasilan seperti ini sangat menonjol di Papua. Sebuah laporan yang dikeluarkan pada tahun 2008 menyimpulkan bahwa masalah politik, sosial, keamanan dan lingkungan yang amat rumit di Papua seakan menyoroti dampak negatif dari eksploitasi sumber-sumber daya alam : "Sampai saat ini, pembangunan perekonomian di Papua masih terpusat pada eksploitasi sumber-sumber daya alamnya. Hal ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang mengabaikan keinginan dan hak-hak dari masyarakat asli Papua terhadap lahan tradisional mereka. Pengambil-alihan lahan untuk melaksanakan sebuah program ekonomi akan berujung pada konflik antara pemilik hak ulayat dengan perusahaan dan pemerintah setempat. Ketika konflik terjadi, pihak keamanan selalu berpihak pada kepentingan perusahaan atau pemerintah setempat".²⁷

Secara umum dana pemerintah sebagian besar pastilah berasal dari pajak atau penghasilan lainnya yang diperoleh dari perusahaan perkebunan. Meskipun hal ini akan memberikan manfaat pada rakyat Papua, tetapi tetap ada kekuatiran bahwa pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah menggunakan dana otonomi khusus secara tidak bijak atau mungkin akan mengkorupsi dana tersebut sehingga rakyat Papua tidak memperoleh manfaat apapun. Walaupun penambahan Anggaran Propinsi untuk Papua dan Papua Barat telah disediakan oleh Jakarta, tetapi ada bukti-bukti kuat yang ada yang menunjukkan bahwa sejumlah besar dari anggaran ini telah diselewengkan. Seorang pejabat senior Propinsi Papua Barat baru-baru ini menyatakan bahwa lebih dari Rp 30 trilyun (US\$ 30 milyar) telah raib, diselewengkan oleh instansi-instansi pemerintah dan pejabat yang "tidak kompeten", pejabat ini juga menyatakan kekecewaannya karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum turun melakukan penyelidikan di Propinsi.²⁸

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pejabat-

BELOW:

Marind Tribe members in Bade, Boven Digul. Most rural Papuans still rely on forest resources for their livelihoods.

OPPOSITE PAGE

TOP:

Illegal logging in Wasur National Park, Merauke, January 2006.

BOTTOM:

Forest Cover in Papua in 2006.



© SPK KAM, November 2007

pejabat setempat dijadikan sasaran oleh perusahaan-perusahaan besar ini untuk mendekati mereka dan memberi kuliah mengenai manfaat ekonomi apabila di daerah mereka ada perkebunan kelapa sawit. Pejabat-pejabat ini diberi iming-iming mengenai besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Seringkali pertemuan ini berupa negosiasi antara dua pihak yang tidak sederajat. Yang lebih parah lagi adalah lobi-lobi yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat setempat agar menyerahkan lahan mereka dengan iming-iming pendapatan dan beragam manfaat bagi mereka. Penelitian lapangan yang dilakukan oleh Telapak/EIA mencatat sejumlah janji-janji yang tidak dipenuhi dan pembayaran yang sangat tidak layak untuk lahan yang digunakan.

Pemerintah sebenarnya sudah menyadari kemungkinan terjadinya masalah-masalah ini, hal ini tampak dari sebuah kajian tahun 1998 mengenai pembangunan pertanian di Papua yang menyebutkan : “Untuk mengambil skenario yang terburuk, ketika Propinsi yang bersangkutan menjadi lebih menarik bagi investor ... akan banyak permohonan untuk kelapa sawit dan hutan tanaman industri lainnya dan juga untuk kayu gelondongan. Apabila pengelolaan pelaksanaannya tidak diperbaiki, maka akan terjadi wabah malaria dan penyakit lainnya, perburuan liar terhadap satwa-satwa unik dan hasil-hasil hutan lainnya, gangguan pada siklus tata air dan timbulnya perasaan terasing pada penduduk asli”²⁹

Sepuluh tahun kemudian, peneliti Telapak/EIA menunjukkan bahwa beragam kekhawatiran di atas telah menjadi kenyataan.



© EIA/Telapak





PERKEMBANGAN PESAT PERKEBUNAN DI PAPUA

© EIA/Telapak

ABOVE:

Oil Palms replace Mooi tribe forests in Klamono, within the plantation of PT Henrison Inti Persada, a subsidiary of the Kayu Lapis Indonesia Group, April 2009.

Pada bulan April 2007, Gubernur Propinsi Papua dan Papua Barat mengumumkan bahwa “mereka berkomitmen untuk mengembangkan sebuah Proyek Perintis [REDD] yang mencakup ... areal tidak kurang dari 500.000 hektar. Kedua propinsi ini menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan lima juta hektar hutan konversi untuk perdagangan karbon”.³⁰ REDD adalah singkatan dari reducing emissions from deforestation and forest degradation, mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yaitu sebuah rencana global yang ambisius yang memberikan nilai ekonomi pada hutan, sehingga hutan yang utuh akan lebih berharga daripada hutan yang ditebangi.

Pada pembicaraan UNFCCC mengenai iklim di Bali pada Desember 2007, Gubernur Propinsi Papua Barat, Barnabas Suebu, mengumumkan kebijakan kehutanannya yang baru – “Dari Hutan untuk Kematian menjadi Hutan untuk Kehidupan”. Dalam pernyataannya ini beliau menyebutkan bahwa hutan-hutan Papua akan dikelola secara lestari dan berkesinambungan dengan cara yang mengembalikan hutan untuk rakyat, mengakhiri konflik pertanahan, mendorong industri perkayuan lokal, dan memastikan bahwa hanya hutan dengan nilai konservasi yang rendah yang akan digunakan untuk perkebunan dan pengembangan bahan bakar nabati. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa hutan-hutan Papua didedikasikan untuk menyelamatkan planet Bumi dan kemanusiaan di masa yang akan datang.³¹ Dalam pidatonya, beliau juga mengumumkan bahwa beliau akan mengurangi areal hutan Papua yang dikonversikan, yang semula 20 persen menjadi hanya 5 persen, dengan pembiayaan yang diperoleh dari perdagangan karbon sesuai dengan kerangka kerja REDD di masa depan.

Tetapi tahun berikutnya, tujuan-tujuan yang mulia ini tampak terurai tidak berbentuk. Dalam sebuah pertemuan dengan pedagang karbon, Gubernur Saebu menyatakan : “Papua saat ini memiliki 31,5 juta hektar, dimana 50 persennya adalah hutan konversi, 20 persen adalah hutan produksi dan sisanya 30 persen akan dikonversikan untuk penggunaan multi-guna termasuk perkebunan, pertanian dan perumahan”. Kelihatannya sembilan juta hektar, areal

yang telah diklasifikasikan sebagai hutan konversi oleh pemerintah pusat masih harus dibuka terlebih dahulu.³²

Memang benar sejak akhir tahun 2006 pejabat-pejabat di Jakarta dan Papua telah mempersiapkan jalan bagi investasi mulai dari pemilik modal raksasa yang mencari lahan bernilai jutaan dolar untuk ekspansi perkebunan berskala industri, terutama untuk kelapa sawit dan produksi bubur kertas (pulp). Tinjauan sekilas atas nama-nama dari pelaku utama yang terlibat dalam perkembangan pesat perkebunan di Papua menunjukkan bahwa individu-individu kaya yang mempunyai koneksi politik dan perusahaan-perusahaan raksasa berlomba menguasai areal yang luas dan bersiap-siap untuk meneguk milyaran dolar.

Telapak/EIA menemukan ketiadaan transparansi yang kronis yang diperparah oleh pengaturan antar instansi pemerintah yang tumpang tindih dan membingungkan, sehingga amat menyulitkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai berapa banyak lahan berhutan di Papua yang telah dilepaskan untuk dialih-fungsikan sebagai perkebunan. Penelitian oleh Telapak/EIA mengindikasikan bahwa sejak akhir 2006 perusahaan-perusahaan perkebunan bekerja sama dengan pejabat pemerintah telah mentargetkan pengambil-alihan setidaknya lima juta hektar hutan di Papua. Perusahaan-perusahaan yang mencari lahan ini tidak seluruhnya telah memiliki perkebunan, dan tidak seluruh areal yang telah dinegosiasikan akan dibuka dan dikembangkan dalam waktu dekat. Pada bulan Februari 2009, pemerintah propinsi Papua menyatakan telah memberikan izin kepada 89 perusahaan perkebunan tetapi hanya 10 yang telah memulai kegiatan di lapangan.³³ Kendala-kendala terkait masalah keuangan yang terjadi karena krisis ekonomi global telah menciutkan niat beberapa investor besar untuk menanamkan modalnya di Papua dalam dua tahun terakhir, tetapi sejalan dengan perbaikan perekonomian di Asia penundaan investasi ini mungkin hanya bersifat sementara.

Sejak awal tahun 2007 berbagai rencana pemerintah dan peta penanaman modal telah menggambarkan secara garis besar 2,8 juta hektar perkebunan di propinsi Papua saja. Data yang diperoleh dari Kantor Perkebunan

Propinsi Papua pada tahun 2008 menunjukkan permohonan yang terinci dan nama-nama investor yang mengajukan permohonan yang menargetkan setidaknya 2,4 juta hektar lahan. Di samping itu masih ada setidaknya lima perusahaan yang menargetkan areal yang lebih luas lagi sekurang-sekurangnya satu juta hektar (Sinar Mas, Genting Group, Medco Group dan sebuah perusahaan yang tidak dikenal Api Metra Palma). Negosiasi dalam skala seperti ini biasanya dilakukan di belakang layar.

Areal utama yang ditargetkan untuk perkebunan di Propinsi Papua termasuk Merauke, Boven Digul dan Mappi, areal sekitar Jayapura (Arso, Lereh, Keerom, Sarmi, dll), Nabire, Mamberamo, Waropen dan Mimika. Di Propinsi Papua Barat, daerah perkebunan yang disukai termasuk Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Kaimana dan Bintuni.

Program-program sebelumnya untuk memperkenalkan perkebunan kelapa sawit di Papua tidak membawa hasil atau setidaknya tidak memberikan manfaat yang jelas bagi penduduk asli Papua. Di kabupaten Prafi, Propinsi Papua Barat, berdiri sebuah perusahaan pemerintah, PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), yang telah beroperasi sejak tahun 1980 dan menguasai lahan seluas 10.500 hektar yang ditanami kelapa sawit. Baru pada tahun 2007, penduduk setempat menerima pembayaran Rp 1.000,- per kilogram buah kelapa sawit, harga ini jauh di bawah harga yang dijanjikan sebelumnya. Dan para pemilik hak ulayat menyatakan penyesalan mereka karena telah menandatangani perjanjian pengalihan lahan. Pada tahun 1996, PTPN II mendirikan perkebunan kelapa sawit lainnya di kabupaten Keerom, propinsi Papua. Pada tahun 2008 pemilik hak ulayat hanya menerima sekitar Rp. 300.000 (US\$ 30) per bulan karena kesulitan mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik pengolahannya.

PENYELIDIKAN LAPANGAN YANG DILAKUKAN TELAPAK/EIA

Dalam upayanya untuk mendokumentasikan tahap awal dari perluasan perkebunan di Papua, pada tahun 2009 penyelidik

Telapak/EIA melakukan sejumlah kunjungan lapangan ke enam daerah terpencil di propinsi Papua dan Papua Barat dimana akan dibangun perkebunan atau telah terdapat perkebunan yang sedang dikembangkan.

Penyelidik Telapak/EIA mengumpulkan pernyataan dari masyarakat setempat yang mengungkapkan bahwa manfaat jangka panjang yang riil (nyata) bagi masyarakat Papua bukanlah merupakan sesuatu yang pasti dan tidak ada satupun manfaat yang dijanjikan itu dinyatakan atau diikat oleh sebuah kontrak. Ganti rugi yang rendah untuk tanah yang diambil-alih merupakan hal yang sudah biasa dan kebanyakan dibayarkan di bawah tangan, demikian juga pembayaran yang semula dikatakan akan diberikan untuk kayu hasil pembukaan hutan ternyata tidak pernah diberikan. Umumnya di daerah yang dikunjungi pembicaraan belum mencapai tingkat rinci mengenai ganti rugi apa saja yang ditawarkan atau manfaat yang katanya akan dibagikan. Yang tampak dari penyelidikan awal ini adalah gambaran suram mengenai eksploitasi, pemaksaan dan janji yang diingkari.

PROPINSI PAPUA BARAT KAYU LAPIS INDONESIA GROUP

Kelompok usaha Kayu Lapis Indonesia Group (KLI) didirikan oleh Gunawan Sutanto, tetapi saat ini dikelola oleh Agus Sutanto. KLI adalah operator perkebunan dan kehutanan di Sorong kawasan Kepala Burung, Propinsi Papua Barat. KLI menguasai konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 333.000 hektar (PT Intimpura Timber Co.), sebuah pabrik kayu lapis, (PT Henrison Iriana) dan juga termasuk empat perkebunan kelapa sawit, yaitu: PT Henrison Inti Persada (HIP), PT Inti Kebun Sejahtera (IKS), PT Inti Kebun Sawit, dan PT Inti Kebun Lestari. Secara keseluruhan keempat anak perusahaan kelapa sawit ini telah menguasai atau dalam proses mencari lahan seluas 142.000 hektar untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan. Seluruh operasional grup KLI berada di areal atau di tanah yang merupakan wilayah suku Malamooi (atau Mooi) yang telah terlibat persengketaan dengan Group KLI sejak awal kedatangan Group KLI ke Sorong.

BELOW LEFT:
Forest clearance by PT HIP in 2003, two years before the company received a permit

BELOW RIGHT:
Forest Clearance by PT HIP by 2009.





© EIA/Telapak

ABOVE:

Mrs Maryodi Malak and her six year old son, Manu, survey deforestation by PT HIP in Klamono in April 2009. Manu was forced to sign a land release document when he was four years old.

Sesudah krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990an, Group KLI memperoleh izin dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan Indonesia untuk melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya yang mencapai US\$ 140 juta kepada Bank Mandiri yang dimiliki oleh negara. Hutang-hutang ini harus dilunasi pada tahun 2011. Beberapa dari hutang-hutang grup ini kepada pemerintah terkait dengan usaha grup ini di bidang perkebunan kelapa sawit, tetapi sebagian besar hutangnya berasal dari pabrik kayu lapisnya.³⁴

Perjanjian restrukturisasi hutang ini secara tak langsung membuat pemerintah menjadi berkepentingan untuk menjaga agar operasional KLI memperoleh keuntungan. Walaupun berhutang sampai US\$ 140 juta, perusahaan tampaknya berhasil mengelakkan dirinya dari tuntutan hukum atau setidaknya pencabutan izinnya karena melanggar Undang-undang Kehutanan, dan bahkan sekarang sedang melaksanakan rencana ekspansi yang cukup ambisius.

Pada bulan April 2009, Telapak/EIA mengunjungi masyarakat Mooi dan bertemu dengan pemilik tanah di dua perkebunan; PT Henrison Inti Persada (HIP) di kabupaten Klamono dan PT Inti Kebun Sejahtera (IKS) di kabupaten Salawati.

PT Henrison Inti Persada

Di kampung Malalis, para pemilik tanah dari marga Klasibin, Gilik dan Doo bercerita kepada Telapak/EIA bagaimana pada awalnya PT HIP mendekati mereka pada tahun 2004. Karena dijanjikan akan dibangun sekolah, perumahan dan diberikan kendaraan dan beberapa fasilitas lainnya, maka marga Klasibin, Gilik dan Doo bersedia untuk menyerahkan hutan seluas 830 hektar kepada HIP. Pada tahun 2005, kedua marga masing-masing hanya menerima Rp 20 juta (US\$ 2.000) sebagai “uang sirih pinang” untuk tanah yang telah diberikan.

Masyarakat pedesaan menceritakan bahwa sebelum pembukaan lahan dimulai tahun 2006, perusahaan HPH KLI, PT Intimpura telah menebang semua pohon besar dan diikuti kemudian oleh sebuah perusahaan kontraktor yang membersihkan semua pohon yang tersisa. Tidak ada ganti rugi yang diberikan untuk pohon-pohon yang diameternya kurang dari 60 cm.

Dalam pembicaraan dengan penduduk desa, Telapak/EIA juga mendengar beberapa kisah tentang hal-hal yang kurang terpuji yang dilakukan oleh pekerja-pekerja KLI untuk memaksa suku Mooi melepas haknya atas sumber daya dan tanah mereka.

Di Klawana, Telapak/EIA bertemu dengan Maryodi Malak, yang menceritakan kepada Telapak/EIA bagaimana HIP membujuk suaminya, Kefas Gifim dan putranya Manu Gisim, untuk melepaskan lahan hutan seluas empat hektar yang mereka miliki. Pada saat itu, putranya baru berusia empat tahun, jauh dibawah usia legal untuk menanda-tangani sebuah kontrak. Nyonya Malak mengatakan : “Anak saya harus menandatangani kontrak tersebut walau ia baru berusia empat tahun. Perusahaan itu telah menipunya”. PT HIP mengatakan kepada Nyonya Malak bahwa mereka menginginkan putra dari seorang pemimpin marga untuk menanda tangani dokumen penyerahan tanah, sehingga apabila pada suatu saat sang ayah wafat, maka akan ada bukti tertulis bahwa generasi berikutnya telah mengikatkan diri pada perjanjian selama 25 tahun yang dapat diperpanjang selama 30 tahun berikutnya. Nyonya Malak menyatakan ia tak pernah menerima salinan dari dokumen yang ditanda tangani oleh cap jempol putranya. Ia juga menceritakan bahwa permintaannya untuk menyisakan sebuah areal kecil dari lahan hutan itu untuk menghidupi keluarganya tidak ditepati dan perusahaan bahkan telah membuka areal lebih luas dari empat hektar sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.

Masyarakat desa yang ditemui Telapak/EIA di Klamono semua sepakat dalam pernyataan mereka bahwa pemerintah setempat dengan gigih membela kepentingan HIP dan sama sekali tidak berbuat apapun bagi kepentingan masyarakat desa selama berlangsungnya perundingan dengan perusahaan. Dalam sebuah pertemuan tahun 2006 yang diadakan di kantor resmi Bupati, sebuah rencana yang terdiri atas 12 butir diantaranya pembangunan jalan, pendirian sekolah, rumah, air bersih, listrik dan fasilitas lainnya yang diminta oleh penduduk desa telah disetujui oleh perusahaan. Tetapi ketika Telapak/EIA bertemu dengan masyarakat Malalis, Klamono dan Klawana pada April 2009, mereka menyatakan bahwa janji pemberian fasilitas-fasilitas tersebut belum dipenuhi sampai sekarang dan mereka menjadi sangat resah.

Keresahan masyarakat ini seringkali meletus menjadi aksi blokade yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang melihat sumber-sumber daya mereka diambil-alih tanpa izin atau ganti rugi yang layak. Ketika konflik-konflik semacam ini terjadi, perwakilan perusahaan datang bersama pejabat pemerintah menenangkan masyarakat dengan pembayaran yang nilainya mungkin setara dengan beberapa juta rupiah. Tetapi kenyataannya adalah tanpa adanya kontrak yang tertulis terkait dengan kompensasi yang memadai maka di

masa depan konflik-konflik semacam ini sangat mungkin berulang kembali. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa dikecewakan dalam hubungan mereka dengan KLI Group. Lukas Doo yang pernah pada suatu saat menyetujui menyewakan 400 hektar lahan kepada HIP berkata : "Perkebunan kelapa sawit masih sama seperti di Intimpura. Betul-betul sama. Menipu masyarakat. Sekarang kami menjadi menderita."

Sebelum melakukan perjalanan ke tanah suku Mooi, Telapak/EIA telah mendengar pengalaman buruk yang dialami suku ini dengan KLI. Pada bulan September 2006, seorang mantan Sekretaris Jenderal di Departemen Kehutanan mengungkapkan bagaimana perwira-perwira dari komando militer Sorong telah mengintimidasi para pemilik tanah suku Mooi agar mereka mau menjual kayu gelondongan milik mereka kepada PT Intimpura dengan harga yang sangat rendah.³⁵

HIP menerima izin dari Menteri Kehutanan untuk mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 32.546 Hektar di Kabupaten Klamono pada tahun 2006.³⁶ Pada bulan Nopember tahun yang sama, dalam sebuah audit yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, terungkap bahwa Intimpura telah menggunakan secara ilegal kayu gelondongan yang diambil dari lahan seluas 600 hektar, padahal perusahaan hanya memiliki izin yang mencakup lahan seluas 200 hektar. Penelusuran atas kayu gelondongan ilegal tersebut yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan mengungkapkan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari PT Henrison Iriana, pabrik kayu lapis milik KLI yang berlokasi di Sorong. Produk kayu lapis KLI dijual ke pasar Jepang, Eropa dan Amerika. Menteri Kehutanan, M.S. Kaban, merekomendasikan bahwa PT Intimpura seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait penggunaan kayu gelondongan ilegal dari 400 hektar lahan dan menginstruksikan Kepala Kantor Kehutanan dan Pertanian Papua Barat untuk mengevaluasi dan mencabut izin penggunaan kayu yang dimiliki KLI.³⁷

Dalam sebuah filem dokumenter yang dirilis oleh Triton, sebuah LSM yang berbasis di Sorong, menunjukkan pohon-pohon kelapa sawit yang berada dalam lahan konsesi PT HIP yang sudah berbuah. Untuk diketahui, pohon kelapa sawit membutuhkan waktu sedikitnya tiga tahun sebelum berbuah, sehingga pohon-pohon yang telah berbuah yang ditunjukkan dalam filem ini jelas menunjukkan bahwa HIP telah mengoperasikan perkebunan kepala sawit sebelum yang bersangkutan memperoleh seluruh izin yang diperlukan.³⁸

Walaupun ada bukti-bukti seperti disebutkan di atas, pada bulan Desember 2007, Departemen Kehutanan malah memberikan izin untuk memanen lebih dari 100.000 meter kubik kayu gelondongan dari tanah suku Mooi yang terletak dalam areal konversi HIP.³⁹

PT Inti Kebun Sejahtera

Pada bulan April, Telapak/EIA menemui marga Masinau dan Matowol di desa Ninjimor, Modan, yang menyatakan mereka telah melepaskan hak atas 1.340 hektar tanah kepada PT Inti Kebun Sejahtera (KIS), salah satu dari tiga unit usaha perkebunan baru yang dimiliki KLI yang terletak di selatan aeral PT HIP konsesi (HPH).

Pada saat diskusi, Telapak/EIA mendapat keterangan bahwa pada tahun 2003, IKS dan Pemerintah setempat mengatakan kepada penduduk desa bahwa dengan menyerahkan lahan mereka untuk perkebunan akan meningkatkan taraf hidup mereka. Warga tidak memberikan persetujuannya, sehingga perjanjian tersebut tidak dibuat. Tekanan demi tekanan dari pejabat pemerintahan setempat terus berlanjut. Pada bulan Nopember 2007, kepala desa dan pemilik tanah Lois Masinau pergi ke sebuah pertemuan yang diadakan di kantor Bupati, dalam pertemuan itu ia diperintahkan untuk menerima tawaran dari IKS karena Bupati hanya memberikan izin bagi perusahaan yang baik. Pada bulan Nopember sebelumnya, Bupati Sorong, John P. Wanane mengeluarkan izin prinsip untuk tiga kebun baru milik KLI Group seluas 110.000 hektar.⁴⁰ Dan setahun kemudian perusahaan tersebut mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk ketiga areal baru tersebut kepada Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi.

Kedua marga dari Ninjimor melepaskan hak atas lahan mereka berdasarkan rekomendasi pejabat pemerintah setempat, dan janji yang diberikan oleh perusahaan bahwa mereka akan mendapatkan perumahan, jalan dan kendaraan serta pendidikan bagi anak-anak mereka sebagai kompensasinya dan juga pendapatan dari kayu gelondongan yang dipanen.

Namun, warga tidak menanda-tangani kontrak dengan IKS, KLI atau dengan pihak Pemerintah, izin untuk melakukan operasi belum ada, sehingga sebenarnya insentif yang ditawarkan pada warga tidak dijamin oleh hukum. Untuk lahan hutan seluas 1.340 hektar, kedua marga mengatakan kepada Telapak/EIA bahwa masing-masing marga hanya menerima uang pengganti sebesar Rp 20 juta (US\$ 2.000) yang setara dengan

BELOW:

Lois Masinau, received merely US\$ 1,000 for renting 441 ha of forest land in Modan to PT IKS, for an unknown period of time.

BOTTOM:

Oil palm seedlings ready to be planted out for PT IKS' plantation on newly deforested land, Modan, Sorong, April 2009.



© EIA/Telapak, April 2009



© EIA/Telapak



ABOVE:

An excavator tears down forest in Modan, Sorong, in April 2009. The company does not have a permit to operate.

sekitar lima belar ribu rupiah per hektar. Mereka juga tidak mengetahui lamanya masa sewa lahan mereka.

Pada saat memberikan persetujuan mereka untuk melepaskan lahan mereka, warga juga meminta agar kayu gelondongan dari lahan yang dibuka dikumpulkan pada tempat penampungan dimana kayu-kayu tersebut akan disortir, diukurg, dinilai dan dilelang dengan harga pasar, sehingga akan didapatkan hasil yang terbaik. Sebagai jawabannya, pihak IKS mengatakan kepada pemilik lahan bahwa perusahaan hanya tertarik pada kayu yang berharga seperti Merbau, dimana perusahaan akan membayar Rp 25.000,- (US\$ 25) per meter kubik, tanpa memperhatikan jenis kayu. Harga ini kira-kira sepersepuluh dari harga pasar untuk kayu Merbau di Papua. Perusahaan kemudian menjual kayu gelondongan segera setelah pembukaan lahan tanpa mengungkapkan volume kayu berharga yang ditebang.

Ketika akhirnya pejabat kehutanan datang melakukan survey pada bulan September 2008, lahan seluas 300 hektar yang tadinya berupa hutan yang lebat sudah terbuka. Pada saat itu pemilik tanah telah menerima pembayaran masing-masing Rp. 50 juta (US\$ 5.000) untuk kayu gelondongan. Harga yang dibayarkan IKS ini setara dengan 2.000 meter kubik kayu, atau setara dengan 6,6 meter kubik per hektar. Padahal izin yang diperoleh KLI untuk membuka hutan dalam areal konsesi HPH HIP menyebutkan potensi kayu n sekitar 16,5 meter kubik per hektar, sehingga ada indikasi warga di Modan telah ditipu.

Penyelidikan yang dilakukan Telapak/EIA menemukan indikasi bahwa IKS juga telah melakukan pembukaan hutan yang melanggar hukum, serupa dengan yang dilakukan oleh HIP. Pertemuan dengan pemilik lahan yang terkena dampak operasional IKS sekali lagi menyoroti pola eksploitasi yang seperti yang dialami oleh masyarakat Mooi yang menerima kompensasi yang sangat rendah.

Dalam data yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Agustus 2009 tentang minyak kelapa sawit di daerah Sorong, menyebutkan

IKS “dalam proses memperoleh izin” untuk areal seluas 38.300 hektar.⁴¹ Ketika Telapak/EIA mengunjungi Modan pada April 2009, PT IKS masih aktif membuka hutan, dengan luas yang jauh melampaui 300 hektar yang telah dibuka pada bulan September 2008.

Masyarakat di Ninjimor menyampaikan informasi kepada Telapak/EIA bahwa perusahaan sebenarnya telah memulai operasi pembukaan hutan di Modan pada Januari 2008, hanya dua bulan setelah mengajukan permohonan izin untuk operasi perkebunan. Dalam kaitannya dengan sebuah persyaratan hukum bagi sebuah perusahaan untuk melakukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); sepanjang yang diketahui warga hanyalah kunjungan dari seorang konsultan dari kantor kehutanan yang melakukan survey pada lokasi lahan pada bulan September 2008 – setelah setidaknya 300 hektar lahan telah dibuka. Persyaratan sebagaimana disebutkan dalam proses AMDAL untuk mengadakan konsultasi dengan warga masyarakat yang akan terpengaruh atau kena dampaknya, tidak pernah dilaksanakan.

Fakta bahwa pembukaan lahan oleh IKS telah melanggar hukum kembali muncul ketika terjadi perselisihan pada bulan September 2008 antara IKS dengan Sebuah Perusahaan Minyak yang beroperasi di sekitar daerah tersebut. Dalam pembicaraan antara kedua pihak terungkap bahwa IKS tidak memiliki izin yang diperlukan dari kantor kehutanan setempat, di lain pihak perusahaan minyak tersebut menyatakan bahwa areal tersebut telah diserahkan secara sah kepada mereka oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Yang selanjutnya terjadi, alih-alih mengusahakan upaya hukum untuk menghukum IKS yang telah jelas melanggar, pemerintah daerah malah berusaha membantu agar operasional IKS dapat disahkan. Seorang anggota DPRD berkomentar di media : “Memang mereka telah beroperasi, tetapi perusahaan harus segera mengurus semua persyaratan yang terkait dengan perizinan resmi sehingga tidak lagi ilegal tetapi akan menjadi legal”.⁴²

Mengingat rekam jejak praktek-praktek ilegal dan eksploitasi oleh KLI, sebuah penyelidikan resmi atas kegiatan-kegiatan perusahaan sudah selayaknya dilakukan.

THE MEDCO GROUP

Medco Group adalah sebuah perusahaan raksasa di Indonesia yang mempunyai kepentingan di sektor perminyakan, gas dan properti dan baru-baru ini merambah ke bidang minyak kelapa sawit dan industri kehutanan, terutama di wilayah Papua. Grup ini dimiliki oleh Arifin Panigoro, seorang pengusaha berpengaruh dan pelaku politik di Indonesia. Sampai saat ini Medco terbilang sebagai salah satu perusahaan yang paling berhasil dalam perkembangan sektor perkebunan yang pesat di Papua, dengan memiliki kebun kelapa sawit seluas 18.000 hektar di Manokwari, Propinsi Papua Barat dan 259.000 hektar perkebunan kayu di Merauke, Propinsi Papua. Menurut laporan Medco berencana untuk mencari satu juta hektar lahan dalam rangka investasinya dalam bidang bubur kertas (pulp), kertas, minyak kelapa sawit dan bahan bakar nabati di Papua.⁴³

Medco Group melalui anak perusahaannya, PT Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) telah memperoleh izin untuk mengelola 18.000 hektar lahan, sebagian besar masih berupa hutan untuk perkebunan kelapa sawit di daerah Manokwari sebagai bagian dari zona pengembangan pertanian yang ditetapkan oleh pemerintah.⁴⁴ Medco juga telah menghubungi pemerintah daerah untuk mendapatkan opsi memperluas areal menjadi 40.000 hektar.

Pada tahun 2008, LSM setempat melaporkan bahwa Medco membayar pemilik lahan dari suku Meyah sebesar US\$ 45 per hektar untuk sewa penggunaan lahan selama 35 tahun. Pada bulan April 2009, Telapak/EIA melakukan perjalanan ke daerah Sidey dan kabupaten Masni di Manokwari untuk mengetahui lebih lanjut rincian perundingan antara warga desa dan Medco.

Di desa Waramuy di Sidey, Telapak/EIA menemui Frans Aska seorang pemilik lahan yang menguraikan pendekatan pertama kali yang dilakukan Medco kepada warga pada tahun 2007. Pada saat itu tidak semua marga yang didekati setuju dengan rencana yang diajukan Medco. Menurut Aska pihak Medco telah datang berkali-kali, bahkan menerbangkan ia dan sembilan orang pemimpin marga lainnya untuk berunding dengan pihak perusahaan di Jakarta. Akhirnya, setelah dijanjikan bahwa Medco akan memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, rumah bagi keluarga mereka, sepeda, dan berbagai fasilitas, mereka bersedia menanda-tangani kontrak resmi di Manokwari pada bulan Desember 2008 – ini adalah satu-satunya kontrak yang dapat dilihat oleh Telapak/EIA dalam kunjungan ke enam areal perkebunan pada bulan Desember 2008 itu. Aska mengakui bahwa ia tidak lancar membaca dan bahwa ia menanda-

tangani kontrak itu dengan cap jempolnya.

Penelitian yang lebih mendalam mengenai kontrak sewa dan penggunaan lahan dengan MPHS mengungkapkan bahwa Medco telah membeli hak untuk menggunakan 36 hektar lahan Aska yang mencakup “ semua yang berada di lahan, diatas maupun yang berada dibawah permukaan tanah”, termasuk kayu yang mencakup periode selama 35 tahun. Hak-hak ini kemungkinan juga mencakup semua jenis mineral, gas dan minyak atau potensi hak karbon. Sebagai imbalannya, Aska menerima Rp 16 juta (US\$ 1.640) atau setara dengan dua belas ribu rupiah per hektar per tahun. Ketika Telapak/EIA mengunjungi areal tersebut, Medco telah membuka sekitar tujuh hektar dari lahan Aska untuk digunakan sebagai Persemaian atau tempat pembibitan kelapa sawit. Aska dan keluarganya dibayar Rp 44.000 sehari untuk bekerja di tempat Persemaian, upah yang dibayarkan ini jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Propinsi.⁴⁵

Di desa Sidey, Telapak/EIA juga bertemu dengan Arnesus Mektis, yang juga ikut menanda tangani kontrak dengan Medco pada bulan Desember 2008 untuk lahan seluas 139 hektar. Baik Aska maupun Mektis menyatakan bahwa mereka dijanjikan, jika setelah mereka menyerahkan lahan mereka, maka mereka akan mendapatkan perumahan, jalan, listrik dan air dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Tetapi, tidak satupun dari manfaat tersebut yang tercantum dalam kontrak yang mereka tanda tangani.

Manfaat yang diterima oleh pemegang hak ulayat sangat tidak pasti dan menyangkut perubahan gaya hidup yang mendasar. Dengan menyetujui untuk menyewakan lahan seluas 18.000 hektar selama 35 tahun, Telapak/EIA memperkirakan bahwa keseluruhan suku Meyah hanya menerima US\$ 800.000. Sementara itu Medco diperkirakan akan memperoleh keuntungan sekitar US\$ 2,5 juta pertahun, sama seperti yang diperolehnya dari perkebunannya yang seluas 12.000 hektar di Sumatra pada tahun 2007.⁴⁶

Memang kelihatannya suku Meyah telah ditekan oleh pihak Medco dan Pemerintah setempat untuk melepaskan hak atas lahan

BELOW:

Franz Aska's thumb print on his contract with Medco Group. The company pays landowners merely US\$ 45 per hectare.

BOTTOM:

Part of 7 ha of Franz Aska's land in Sidey, Manokwari, cleared for Medco Group's oil palm plantation nursery. April 2009.



© Telapak/EIA



© EIA/Telapak

**TOP:**

Sagu forest being cleared and drained by Sinar Mas Group in Mambruk, Jayapura, West Papua province, in 2008.

ABOVE:

Arnesus Mektis had to fight to retain a copy of his 139 hectare land rental contract with the Medco Group.

mereka dengan imbalan yang amat rendah. Mektis mengatakan kepada Telapak/EIA : "Bahwa memang ada tekanan dari Perusahaan dan dari Pemerintah setempat. Ada seorang manajer perusahaan yang menekan kami, ketika kami hendak menghentikan perundingan". Ia juga mengatakan bahwa perusahaan telah memotong lebih dari separuh dari harga yang mereka minta untuk pembayaran lahan.

PROPINSI PAPUA**SINAR MAS GROUP**

Sinar Mas Group, sebuah anak perusahaan dari Golden Agri Resources yang terdaftar di Singapura dan dimiliki oleh keluarga Widjaja, adalah salah satu perusahaan perkebunan Indonesia terbesar, dan juga pihak yang menyebabkan terjadinya deforestasi secara besar-besaran di Indonesia. Pada bulan Maret 2009, GAR menyatakan bahwa mereka telah membudidayakan sekitar 396.000 Hektar kebun kelapa sawit di Indonesia, yang menjadikannya "salah satu terdaftar terbesar dari perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi secara vertikal dan juga sebagai produsen dari minyak kelapa sawit mentah dan produk sulingan kelapa sawit di dunia".⁴⁷

GAR juga adalah perusahaan induk dari Asia Pulp and Paper (APP), sebuah perusahaan bubur ketas (pulp) dan kertas terbesar di Indonesia. Perusahaan ini diperkirakan menguasai sekitar 1,4 juta hektar hutan di Indonesia.⁴⁸

Selama tahun 2007, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemasok kayu bagi APP dituduh terlibat dalam pembalakan liar besar-besaran di Riau, Sumatra dan dalam bulan Nopember 2007, sebuah tim terpadu yang dibentuk oleh Presiden Yudhoyono untuk menyelidiki kasus ini mengeluarkan rekomendasi agar perusahaan ini dituntut. Tetapi walaupun ada bukti-bukti yang kuat, penyidikan kasus ini dibatalkan oleh polisi.⁴⁹

Pada bulan Maret 2009, sebuah organisasi konservasi menyatakan bahwa : "APP telah mengubah lebih dari sejuta hektar hutan alam di propinsi Riau dan Jambi di Sumatra menjadi hutan tanaman industri untuk pulp".⁵⁰

Setelah menghadapi kontroversi selama bertahun-tahun akibat kegiatan operasionalnya yang menghancurkan hutan di Sumatra, Sinar Mas sekarang secara agresif melakukan ekspansi usahanya di Papua. Perusahaan telah menguasai 11.000 hektar perkebunan di Papua dan dalam dua tahun terakhir sedang melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan setidaknya sejuta hektar lagi untuk ekspansi usahanya.

Pada bulan Januari 2007, Sinar Mas mengumumkan rencananya untuk menginvestasikan dana sebesar US\$ 5,5 milyar bersama dengan sebuah Perusahaan milik negara Cina untuk mengembangkan produksi bahan bakar nabati yang berbasis minyak kelapa sawit yang akan berpusat di Papua dan Kalimantan. Pada bulan Maret, anggota DPRD Papua mengumumkan bahwa mereka merencanakan akan mencari sekitar sejuta hektar lahan untuk Sinar Mas di daerah Boven Digoel, Mappi, Merauke, Sarmi dan Jayapura.⁵¹ Walaupun pada saat ini tampaknya rencana ini tertunda, Sinar Mas tetap bergerak maju dengan rencana ekspansinya.

Sejak awal 2007, Sinar Mas telah mempertontonkan beberapa filem yang mempromosikan perusahaan mereka dan rencana ekspansi mereka di bawah bendera pembangunan. Salah sebuah filem ini mempertunjukkan seorang pemegang hak ulayat dari Boven Digoel yang sedang diajak meninjau perkebunan Sinar Mas di Pekanbaru, Sumatra.⁵² Perjalanan-perjalanan semacam ini memang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dalam upaya mereka mempengaruhi pemilik lahan untuk menyerahkan lahan mereka di Papua.

Dokumen internal dari tahun 2007 yang telah dipelajari oleh Telapak/EIA menyebutkan bahwa untuk menghindari pembatasan yang mengatur bahwa sebuah perusahaan dilarang menguasai lebih dari 200.000 hektar kebun kelapa sawit, Sinar Mas telah membentuk beberapa perusahaan untuk mengajukan permohonan untuk membuka perkebunan, di antaranya enam perusahaan yang mengajukan permohonan untuk areal seluas 637.725 hektar dan enam perusahaan lainnya mengajukan permohonan areal seluas 914.117 hektar di daerah Boven Digoel.⁵³ Sinar Mas juga mengusahakan pembiayaan untuk rencana besar ekspansinya ini melalui penerbitan saham dalam Golden Agri Resources (GAR). Setidaknya modal sebesar US\$ 4 juta yang terkumpul akan "mendukung pertumbuhan organik perusahaan dengan cara mendanai akuisisi lahan, penanaman pohon kelapa sawit, pembangunan pabrik baru dan penyulingan".⁵⁴

Dalam bulan Setember 2009, Telapak/EIA melakukan perjalanan ke daerah Lereh di Kabupaten Kaureh, Jayapura, untuk menemui anggota dari suku Kaureh-Yapsi dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut dampak dari kegiatan Sinar Mas. Seperti sebelumnya, kisahnya adalah mengenai rasa frustrasi dan kemarahan sebuah komunitas

karena kecilnya manfaat yang diterima dari perkebunan yang beroperasi di daerah mereka, walaupun sebelumnya perusahaan telah berjanji akan membangun daerah mereka.

Di daerah Sisik, dekat Lereh, para pemilik hak ulayat dan warga menjelaskan bahwa orang tua mereka telah melepaskan hak atas lahan mereka pada tahun 1991. Penduduk setempat menceritakan bahwa mereka meminta truk untuk setiap marga sebagai imbalan untuk lahan yang mereka berikan dan mereka juga dijanjikan kompensasi yang setara dengan 0,5 persen dari nilai minyak kelapa sawit dari perkebunan setelah mulai berproduksi. Para pemilik hak ulayat juga akan menerima Rp 11 juta (US\$ 1.100) untuk setiap marga sebagai pembayaran pelepasan hak tanah. Seperti sebelumnya janji hanya diberikan secara lisan dan tidak kontrak yang mengikat dengan pihak perusahaan.

Tahun demi tahun berlalu dan janji-janji dari perkebunan Sinar Mas tak kunjung tiba. Warga menyampaikan protes mereka bahwa mereka tidak pernah menerima truk yang dijanjikan oleh Sinar Mas dan ketika pembayaran untuk CPO dimulai pada tahun 2001 ternyata jumlahnya sangat tidak memadai – hanya sekitar Rp 500.000 (US\$ 50) untuk setiap marga selama tiga bulan. Walaupun pembayaran telah dinaikkan menjadi satu juta rupiah (US\$ 100) pada bulan Agustus 2009, tetapi tetap saja tak ada jaminan bahwa kenaikan ini akan bersifat permanen.

Seorang anggota komunitas, Simon Yamle, berkata : “ Kami pikir uang ini tidak cukup cukup untuk semua anggota dari setiap marga. Karena jumlahnya sangat minim, sangat kecil.” Seorang warga setempat lainnya, Octavianus Bitaba berkata : “ Sampai saat ini kami telah menanti lebih dari sepuluh tahun. Keberadaan Perusahaan Sinar Mas dan kerjanya hanya berdasarkan janji.” Tiga belas tahun setelah mereka menyetujui untuk melepaskan hak atas tanah mereka, warga setempat masih belum melihat pembangunan dan penghasilan yang dijanjikan.

Perasaan tidak puas yang makin merebak menyebabkan para pemilik hak ulayat kini menuntut kompensasi yang berarti dari Sinar Mas atas eksploitasi hutan dan sumber daya mereka. Telapak/EIA mendapatkan salinan dari surat-surat yang diberikan kepada Sinar Mas pada September 2008 dan Agustus 2009 yang tembusan telah dikirimkan ke sejumlah pejabat daerah setempat dan nasional. Surat-surat ini menyebutkan kelalaian perusahaan untuk membayar kayu gelondongan yang mereka tebang di lahan milik marga, yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur Propinsi dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian yang menetapkan bahwa perusahaan harus menyisihkan dua puluh persen dari areal perkebunan untuk warga setempat. Secara keseluruhan warga

menuntut kompensasi sekitar Rp 235 milyar (US\$ 24 juta).

Telapak/EIA mendapatkan informasi bahwa komunitas ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah dalam merundingkan perjanjian yang lebih baik dengan Sinar Mas, dan sebagian besar warga menganggap bahwa perusahaan dan pemerintah memang bekerja sama. Sekali lagi, memang inilah perasaan yang dirasakan oleh warga desa di sekitar areal perkebunan.

Sinar Mas saat ini sedang memperluas konsesi Lereh ke arah Mambuk dimana ribuan hektar hutan yang lebat sedang dibuka. Potensi terjadinya konflik dengan warga yang tidak puas amat tinggi. Dalam dokumen saham yang ditebitkannya GAR menyatakan : “ Kekuatiran sosial Group yang paling utama terkait dengan kemungkinan terjadinya konflik dengan masyarakat setempat di sekitar areal perkebunannya.” Tetapi pada saat yang bersamaan kelompok perusahaan ini juga berusaha menenangkan para calon pemegang sahamnya dengan menyatakan : “ Peraturan mengenai lingkungan dan praktek sosial di negara dimana Group beroperasi cenderung tidak terlalu keras dibandingkan dengan yang diterapkan di negara-negara maju”.⁵⁵

RAJAWALI GROUP

PT Tandan Sawita Papua, sebuah anak perusahaan dari Rajawali Group, memiliki izin untuk membebaskan hutan seluas 26.000 hektar untuk digunakan sebagai kebun kelapa sawit di Kabupaten Arso Timur, Keerom, yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Hal ini dilakukan walaupun suku Manen yang menghuni lokasi tersebut berulang kali menolak tawaran yang diajukan Rajawali. Rajawali Group dimiliki oleh seorang pengusaha berpengaruh, Peter Sondakh, yang disebut-sebut sebagai orang terkaya nomer lima di Indonesia. Kegiatannya yang utama mencakup usaha perkebunan, properti dan pertambangan.⁵⁶

Upaya dari masyarakat setempat untuk mendorong budi-daya tanaman coklat dalam skala kecil dan bukannya pembukaan hutan

BELOW:

Sagu forest replaced with Sinar Mas oil palms in Mambuk, Jayapura, 2008. Sagu is the staple food for rural Papuans. The Yapse Kaureh tribe landowners have claimed US\$ 24 million compensation from Sinar Mas.



secara besar-besaran untuk penanaman kelapa sawit telah ditolak mentah-mentah oleh pemerintah setempat. Seorang pimpinan marga setempat, Augustine. P. F. Kres, menjelaskan mengapa masyarakat menentang Penanaman kelapa sawit : “ Masyarakat Keerom memiliki kehidupan, karena mereka memiliki lahan asli dan hutan. Apabila hutan tradisional mereka musnah berarti umat manusia dan kehidupannya juga berakhir”, seraya menambahkan “karena itu kita harus membatasi pembangunan perkebunan kelapa sawit yang akan menghancurkan hutan”.⁵⁷

Setelah memberikan izin final kepada Rajawali, Gubernur Suebu berbicara pada upacara peresmian perkebunan pada bulan Januari 2008, ia menyebutkan bahwa perkebunan akan membawa “sebuah hari yang baru untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan yang lebih terjamin, damai dan sejahtera untuk kita semua.” Daryoto Setiawan yang mengepalai perkebunan Rajawali di Keerom berkata : “Dalam beberapa tahun ke depan, Papua akan menjadi salah satu pusat pengembangan kebun kelapa sawit yang terbesar dan terbaik di dunia”.⁵⁸

Tampaknya warga setempat amat meragukan akan masa depan yang dijanjikan. Setelah dibujuk untuk menyerahkan lahan pada saat mengikuti perjalanan tur yang diselenggarakan oleh Rajawali Group ke Kalimantan Selatan dan pembayaran insentif yang telah diberikan kepada pemimpin daerah setempat, tidak adanya kompensasi telah mendorong warga untuk merampas kunci bulldozer dalam upaya mereka untuk menghambat pembukaan hutan oleh Rajawali.⁵⁹

Ketika mengunjungi desa Yetti di Arso Timur pada bulan September 2009, penyelidik dari Telapak/EIA mendapatkan informasi bahwa masyarakat telah tiga kali menolak tawaran pihak perkebunan karena mereka tidak menginginkan seluruh lahan mereka dialih-fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Telapak/EIA juga mendengar dari Kepala Suku Yetti, Martin Putuy, bagaimana negosiasi yang terjadi antara pihak

pemerintah dan perusahaan dengan masyarakat adat sejak berlangsungnya protes yang telah mengakibatkan beberapa dari pemilik hak ulayat sudah bersedia untuk menyerahkan hak mereka, walaupun masih banyak juga yang tidak setuju. Ia memperkirakan separuh dari lahan yang izinnya telah diperoleh Rajawali akan dibebaskan, walaupun kesepakatan akhir belum tercapai.

Ketika berada di Yetti Telapak/EIA mendengar kabar bahwa beberapa tim yang terdiri dari pejabat Departemen Kehutanan yang ditemani oleh pihak militer melakukan survey di hutan bersama pemimpin daerah/setempat untuk menentukan areal mana yang dapat dikonversi. Sebagian warga lokal masih merasa tidak senang dan membuat penghalang jalan untuk mencegah rombongan pejabat tersebut mendekati lahan mereka. Upaya untuk menolak kehadiran perkebunan dibuat semakin rumit karena Keerom adalah sebuah areal “merah” dengan kehadiran pihak militer yang amat kuat. LSM setempat dan aktivis HAM telah berulang kali melaporkan intimidasi oleh aparat militer terkait dengan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan di Keerom.⁶⁰

Rajawali Group adalah anggota United Nations Global Compact. Dalam laporan untuk tahun 2007-2008, Ketua Peter Sondakh mengatakan : “ Unit usaha perkebunan kami dipandu oleh komitmen kami yang kuat terhadap perlindungan dan konservasi lingkungan”.⁶¹

MERAUKE - PERKEBUNAN POLITIK

Sebagai salah satu daerah awal yang diperuntukkan bagi transmigrasi pada rejim Suharto, kawasan Selatan Propinsi Selatan Papua yang terdiri dari Kabupaten Merauke, Boven Digoel dan Mappi menerima dampak terbesar dari perkembangan pesat perkebunan di Papua. Kawasan yang landai dan potensi tegakan hutannya amat menarik bagi industri kehutanan, perkebunan dan berbagai kegiatan pertanian. Dan di kawasan Propinsi ini juga terletak areal hutan yang terluas yang diperuntukkan sebagai Hutan Konversi.

Kawasan ini memiliki keaneka-ragaman ekosistem yang unik, termasuk diantaranya adalah hutan dataran rendah tropis, hutan bakau, hutan Eucalyptus dan padang rumput. Di kawasan ini juga merupakan lokasi dari Transfly eco-region yang dikenal di seluruh dunia yang mencakup lebih dari sepuluh juta hektar dan meliputi wilayah Papua dan Papua New Guinea. Taman Nasional Wasur yang terbentang dekat dari kota Merauke sampai ke perbatasan dengan Papua New Guinea adalah kawasan Hutan Lindung yang amat penting di dunia.

Antara bulan Januari dan Agustus 2007, pejabat pemerintah daerah setempat mengeluarkan izin prinsip kepada sejumlah

BELOW:

Manen tribe leader, Augustine. P. F. Kres: “It is necessary to restrict the oil palm plantation that will transform the forest to nothing.”

BOTTOM:

Rajawali Group’s Daryoto Setiawan - “In some years to come, Papua will stand out as one of the biggest and the best palm oil development centres in the world”.



besar perkebunan, termasuk untuk perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI) yang mencakup areal seluas 1,5 juta hektar.⁶² Pada akhir 2007, Bupati Merauke mengumumkan bahwa areal tambahan seluas 4,5 juta hektar juga telah disediakan untuk lokasi perkebunan, ini sama dengan luas seluruh wilayah Kabupaten.⁶³ Data yang diperoleh dari kantor kehutanan setempat menunjukkan bahwa 1,2 juta lahan telah diperuntukkan untuk perkebunan di Merauke, hampir sejuta hektar dari lahan peruntukkan ini masih digolongkan sebagai hutan.⁶⁴

Salah satu dari investor utama dalam sektor perkebunan di Merauke adalah Medco Group yang telah membelanjakan sekitar Rp 20 triliun (US\$ 2 milyar) untuk sebuah hutan tanaman industri (HTI) dan pabrik untuk memproduksi bubur kertas (pulp) dan kertas. Melalui anak perusahaannya, PT Selaras Inti Semesta (PT SIS), kelompok usaha ini telah mendapatkan izin untuk mengelola Hutan Tanaman Industri seluas 259.000 hektar.⁶⁵ Kajian atas izin ini menunjukkan bahwa PT SIS akan memperoleh sekitar 15 juta meter kubik kayu gelondongan dari hutan alam yang berada dalam wilayah konsesinya.

Pada bulan Juni 2008, sebuah anak perusahaan Medco yang lain, PT Medcopapua Industri Lestari, memperoleh izin untuk mengoperasikan sebuah pabrik kertas baru yang terletak di areal seluas 2.800 hektar di desa Buepe, Kabupaten Kaptel, Merauke yang mampu memproses dua juta ton bubur kertas per tahun. Media setempat melaporkan bahwa Medco sudah mulai membuka lahan untuk pabrik ini pada Februari 2008, tepat setahun sebelum izin untuk menebang diperoleh.⁶⁶ Keberadaan perusahaan ini telah menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Marind yang mendiami kawasan ini, dengan adanya dugaan bahwa lahan yang digunakan untuk pabrik diperoleh dengan cara yang melanggar tata cara masyarakat asli terkait dengan penggunaan lahan.⁶⁷

Medco juga merencanakan sebuah proyek kerja sama raksasa dengan perusahaan Korea, LG International (bagian dari LG Group, sebuah perusahaan konsumen elektronik yang terkenal). Kerja sama ini akan terpusat pada pembangunan hutan tanaman industri seluas satu juta hektar di Merauke.⁶⁸ Menurut rencana yang dituturkan oleh pihak manajemen "... lahan akan dibagi menjadi enam bagian dan semua pohon berdaun lebar pada salah satu dari keenam bagian ini akan ditebang habis", untuk memproduksi chip kayu sebanyak 1,4 juta ton dan palet kayu sebanyak 3,6 juta ton per tahun untuk memproduksi energi.⁶⁹

Salah satu proposal perkebunan terbesar di kawasan ini adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), yang merupakan rencana pemerintah pusat untuk mengubah daerah ini menjadi kawasan pertanian yang luas. Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah mencari investor

yang berminat dari Timur Tengah, Cina dan Korea. Rencana ini diperkirakan akan mencakup areal seluas 1,7 juta hektar.⁷⁰

Ekspansi perkebunan secara besar-besaran di Merauke sangat terkait dengan upaya pemerintah Kabupaten Merauke yang dipimpin oleh Bupati Johannes Gluba Gebze yang ambisius untuk menciptakan Propinsi baru – Propinsi Papua Selatan – di wilayah kabupatennya. Karena masa tugas Gebze hampir berakhir, maka bayangan akan menjadi seorang Gubernur di sebuah propinsi baru dapat menjadi jalan baginya untuk mempertahankan kekuasaan. Beberapa tokoh berpengaruh di Jakarta yang mendukung ide Gebze disebut-sebut sebagai sebuah "aliansi pihak militer dan nasionalis yang bekerja sama dengan politisi lokal".⁷¹

Kombinasi dari aspirasi politik Gebze, kepentingan pemerintah pusat dan potensi investasi raksasa yang akan diperoleh dari perluasan perkebunan telah menciptakan suatu iklim yang penuh tekanan kepada siapapun yang menentang perluasan perkebunan atau pembentukan propinsi baru. Sumber-sumber setempat melaporkan bahwa kelompok-kelompok iregular bekerja sama dengan aparat keamanan negara dalam memantau dan mengintimidasi para penentang di kawasan ini.

Ada sekitar 3.000 tentara yang bertugas di kawasan sekitar Merauke dan Boven Digoel, dengan pos-pos keamanan yang terbentang setiap lima kilometer antara Merauke dan Muting dan Asiki di Boven Digul sampai ke bagian timur laut.⁷² Keberadaan personil militer di daerah ini disebutkan untuk melindungi kepentingan perusahaan perkayuan dan perkebunan yang beroperasi di daerah ini. Sebagai contoh adalah Korindo yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang besar dan Pabrik kayu lapis di daerah ini.

BELOW:

Korindo Group's palm oil mill in Boven Digul. Locals say they have benefited little from the operations.



© SKP KAM

Top 5 Conversion Forest Areas – Papua Province

Kabupaten	Total (ha)	Conversion Forest (ha)	% of total as HPK
Merauke	4,350,789	1,412,988	32.5%
Mappi	2,614,050	873,354	33.4%
Boven Digul	2,726,932	809,909	29.7%
Mimika	2,131,049	507,327	23.8%
Sarmi	3,218,524	381,780	11.8%

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi, August 2009, www.bpphp17.web.id/database/data%200809/A2.htm

**TOP:**

Indonesian troops disembark at Merauke in 2007. 3000 soldiers are stationed in plantation expansion areas across Merauke and Boven Digul.

ABOVE:

The plantation expansion plans of Johannes Gluba Gebze, Bupati of Merauke (left of image), are connected to his aspirations for a new province, an initiative reportedly supported by an "alliance of military and nationalist figures".

Perusahaan ini diduga memberikan uang secara rutin kepada pihak militer,⁷³ sejak perusahaan ini terlibat persengketaan dengan masyarakat setempat terkait pengoperasian pabriknya.⁷⁴

INVESTOR LUAR NEGERI MENEGUK KEUNTUNGAN

Makin maraknya promosi mengenai revolusi energi yang hijau sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim membuat para pengambil keputusan di ruang rapat konglomerat internasional berpikir keras bagaimana caranya agar dapat ikut meneguk keuntungan dari lonjakan permintaan akan bahan bakar nabati.

Penelitian yang dilakukan oleh Telapak/EIA telah mengidentifikasi beberapa transaksi yang bernilai jutaan dolar terkait dengan hutan-hutan Papua melibatkan dana dan perusahaan dari Hong Kong, Singapura dan wilayah bebas pajak seperti British Virgin Islands yang berusaha meneguk keuntungan dari insentif melimpah yang diberikan pemerintah Indonesia dan mengenakan baju perusahaan perkebunan yang "hijau". Dengan membentuk jalinan kerjasama dengan mitra setempat dan memanfaatkan undang-undang baru tentang investasi asing Indonesia yang murah hati; investor dari Cina, Korea, Singapura, Malaysia dan Timur Tengah berbondong-bondong untuk mendapatkan "sepotong kue" dari rencana pengembangan perkebunan yang pesat di Papua.

Transaksi-transaksi semacam ini telah mengubah batas hutan-hutan Papua dan kehidupan warga asli Papua. Sebuah contoh dari investasi asing yang besar di sektor minyak kelapa sawit di Papua adalah transaksi rumit yang melibatkan CCT Resources dari Hong Kong.

CCT RESOURCES - MENYEMPURNAKAN HUTAN DENGAN MINYAK KELAPA SAWIT

Pada tanggal 12 Agustus 2008 CCT Resources sebuah perusahaan yang terdaftar di kepulauan Cayman membeli konsesi hutan (HPH) seluas 313.000 hektar di Kabupaten Mimika yang terpencil di Pantai Selatan

Propinsi Papua. Perusahaan berniat untuk mengalih-fungsikan 200.000 hektar dari lahan konsesi ini menjadi perkebunan kelapa sawit.

Transaksi melibatkan pembelian Merdeka Timber Group Ltd. (MTG) dengan nilai US\$ 100 juta oleh CCT melalui dana yang disalurkan kepada Merdeka Commodities Limited (MCL) yang terdaftar di kepulauan British Virgin Island.⁷⁵

Jumlah yang dibayarkan ini hanya setara dengan US\$ 320 per hektar, yang kelihatannya didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Pöyry Forest Industry, yang memperkirakan stok kayu gelondongan pada lahan yang dikuasai MCL kurang lebih bernilai US\$ 148 juta. Laporan ini menyebutkan bahwa sebagian besar lahan masih berbentuk hutan dan sebagian masih berbentuk hutan perawan, yang disebut dalam laporan sebagai berikut: "Hampir keseluruhan lahan konsesi (HPH) di Mimika belum pernah disentuh atau diubah dari kondisi aslinya".⁷⁶

Areal hutan yang dibeli CCT kemudian dibagi menjadi tiga konsesi yang dinamai Blok Timur, Tengah dan Blok Barat. Survey yang dilakukan Pöyry menunjukkan bahwa sebagian besar lahan mempunyai deposit gambut yang tebal dan kemungkinan menyimpan stok karbon dalam jumlah besar. Jumlah nilai komersial dari stok kayu gelondongan di lahan yang dibeli oleh CCT diperkirakan sekitar tiga juta meter kubik.

Angka ini didapatkan dari penebangan dengan sistem tebang pilih (selective logging mode) dari sebuah hutan konversi dan bukan merupakan angka yang didapat apabila lahan tersebut dibuka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Apabila tetap dilakukan alih fungsi dari lahan seperti yang direncanakan, maka pendapatan CCT dari kayu gelondongan akan jauh di atas perkiraan yang dibuat Pöyry yang memperkirakan nilai stok kayu gelondongan di kisaran US\$ 150 juta, yang merupakan basis biaya akuisisi.

CCT adalah pemain baru di sektor perikanan dan perkebunan dan direksinya menyatakan bahwa mereka akan meningkatkan kualitas stok karbon dari hutan yang lebat dengan cara menebang habis pohon-pohonnya. Perusahaan menyatakan "Demi masa depan yang cerah untuk masyarakat dan lingkungan, MTG Group merencanakan untuk meningkatkan kualitas hutan dengan menanam lahan hutan dengan kelapa sawit". Perusahaan ini kelihatannya merencanakan untuk meneguk keuntungan dari perkiraan lonjakan permintaan bahan bakar nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit "karena negara-negara industri maju telah menyatakan komitmen mereka untuk mengurangi emisi rumah kaca." Tetapi masalahnya adalah menebang pohon-pohon di areal seluas 200.000 hektar dimana sebagian besar pohon tersebut hidup dan tumbuh di atas lahan gambut dan

menggantikannya dengan pohon kelapa sawit justru akan memperbesar emisi rumah kaca, jauh diatas manfaat yang mungkin diperoleh dari menggunakan bahan bakar nabati yang dihasilkan (lihat halaman 4).

Laporan CCT dan data keuangan lainnya menunjukkan bahwa Merdeka Timber Group (MTG) hampir seluruhnya dikendalikan oleh seorang pengusaha, Lai Wing Hung. Lai tercatat sebagai direktur Merdeka Timber Group dan Merdeka Timber Trading yang berbasis di Hong Kong.⁷⁷ Lai juga menguasai saham mayoritas di CCT Resources Holdings. Ia disebut-sebut sebagai pemilik beberapa konsesi hutan di Indonesia dan Amerika Latin dan mempunyai hubungan dengan beberapa tokoh di dunia politik.⁷⁸

Tampaknya CCT mempunyai koneksi yang kuat di Cina Daratan. Penasihat-penasihatnya termasuk perwakilan dari Kongres Nasional XVI Partai Komunis Cina yang berkuasa di RRC, dan juga seorang mantan direktur badan energi dari Komisi Pembangunan dan Reformasi (State Development and Reform Commission) yang amat berkuasa. Dan dalam jajaran manajemen senior perusahaannya duduk mantan wakil dari Badan Administrasi Kehutanan Negara (State Forestry Administration).⁷⁹

Tokoh lain yang terlibat dalam transaksi ini adalah Sontang Alboin Manurung dan Ray Gutafson Manurung, dari Sumatra yang memiliki saham di PT Merdeka Tapare Timber, sebuah perusahaan yang mayoritas pemilikinya adalah MTG yang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin untuk membangun Pabrik Pengolahan Kayu yang datang dari areal konsesinya.⁸⁰

Pada bulan Juli 2009, kepala kantor wilayah kehutanan, perkebunan dan hortikultura Mimika, mengumumkan bahwa PT Merdeka Plantation Indonesia, adalah sebuah anak perusahaan MTG ayang merupakan salah satu dari dua perusahaan yang memperoleh izin untuk mengembangkan perkebunan minyak kelapa sawit di Mimika. Ia menyatakan bahwa Gubernur Papua, Suebu, telah memberikan izin untuk membuka perkebunan dan walaupun perusahaan belum memiliki izin untuk memanfaatkan kayu gelondongan yang diperoleh ketika membuka hutan (Izin Pemanfaatan Kayu, IPK), perusahaan telah menyiapkan areal Persemaian dan akan segera memulai operasinya yang berskala besar dalam waktu dekat.⁸¹

CCT melaporkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2009, perusahaan telah “mulai memanen kayu dari hutan untuk membangun pabrik pengergajian dan membangun jalan masuk ke hutan”, dan untuk itu penjualan kayu gelondongan diharapkan dapat dimulai pada pertengahan tahun 2009”. Tampak jelas bahwa perusahaan mengharapkan akan mendapat keuntungan besar dari modal yang ditanamkannya melalui pernyataan yang dirilisnya yang berbunyi “permintaan yang

tinggi untuk kayu gelondongan dan produk kayu sedangkan pasokan sangat sedikit” dan “potensi pertumbuhan usaha yang besar karena permintaan akan minyak kelapa sawit yang terus meningkat sebagai sumber energi alternatif untuk bahan bakar fosil”.⁸²

Pada bulan Mei 2008, ketika CCT sedang mempersiapkan akuisisi Merdeka Timber Group, Pemerintah Propinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika menanda tangani perjanjian dengan pedagang karbon, mencari upaya untuk mencegah deforestasi melalui pemanfaatan stok karbon yang terdapat di hutan.⁸³

Seorang pejabat senior Mimika, Marthin Giay, menyatakan dukungannya terhadap gagasan ini dengan mengatakan : “Pemerintah daerah sangat menyetujui kampanye untuk melindungi hutan Papua, karena sebagian hutan Papua sudah rusak”.

Tetapi pada saat yang bersamaan, pejabat-pejabat lainnya terlibat kerja sama dengan Merdeka Timber Group, yang tidak lama kemudian dibeli oleh CCT seperti Bupati Kabupaten Mimika Baru, James Noldy Sumigar, bahkan sudah melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi kegiatan pembukaan hutan yang akan dilakukan oleh PT Merdeka Timber, sehingga penanaman pohon kelapa sawit dapat segera dimulai.⁸⁴

Tidak hanya itu, Telapak/EIA juga mendapatkan informasi bahwa Aloysius Raфра, mantan Bupati Mimika telah diangkat menjadi komisaris PT Merdeka Plantation Indonesia, perusahaan yang bertugas mengembangkan perkebunan di daerah ini.⁸⁵

Tampak jelas bahwa potensi keuntungan yang mungkin diraih telah mengalahkan segala upaya untuk melindungi areal hutan. Sebagai contoh, Blok Timur dari areal baru konsesi CCT memiliki potensi kayu Merbau yang berharga yaitu 15 meter kubik per hektar. Dengan harga sekarang, kayu Merbau yang dijual akan menghasilkan US\$ 7.500 per hektar atau dua puluh kali lipat dari nilai yang dibayarkan oleh CCT. Apabila jenis kayu lainnya seperti Matoa, Mersawa dan Nyatoh juga akan dihitung maka tiap hektar mempunyai potensi rata-rata 129 meter kubik kayu yang berharga. Sungguh sebuah keuntungan yang besar yang akan diperoleh CCT dari rencananya untuk menghancurkan hutan.

BELOW:

Millionaires flitting between the glittering financial centres of Hong Kong and Singapore, and tax havens such as the British Virgin Islands are reaping the rewards of Papua's bio-fuel driven deforestation surge.



HUTAN UNTUK RAKYAT

ABOVE:

Locals salvage timber from forests to be cleared by the Medco Group in Manokwari, April 2009.

OPPOSITE PAGE:

Papuans still rely on forests for their daily needs, including: materials for building and local handicrafts (top), and Sagu - the staple food for Papuans (bottom right). Small scale chocolate plantations (bottom left) have been supported by locals. Such activities could continue within forest landscapes preserved through funding for reducing deforestation, or REDD.

Sebuah visi alternatif selain perluasan perkebunan dalam skala besar amat dibutuhkan untuk menjamin bahwa Sumber Daya Hutan Papua dapat dikelola secara lestari dan berkesinambungan untuk memberikan manfaat bagi warga setempat, dan bukannya untuk memperkaya perusahaan-perusahaan. Pemberdayaan masyarakat Papua dalam mengelola sumber mata pencaharian yang berkelanjutan melalui kepemilikan hak untuk mengelola Sumber Daya Alam mereka sendiri, menjadi hal yang sangat penting.

Hutan Kemasyarakatan

Masyarakat Papua ingin mengelola lahan dan sumber daya alam mereka sendiri, dan apabila keinginan ini dirancang dan dilaksanakan dengan benar maka Hutan kemasyarakatan akan menjadi jalur bagi pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Walaupun izin untuk menerapkan Hutan Kemasyarakatan telah ada menurut skema terdahulu (dikenal dengan nama IPKMA), tapi skema tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan buruk pada tingkat pusat dan propinsi, dimana masyarakat lokal tidak mempunyai kapasitas yang cukup dan tidak memperoleh bantuan untuk mengelola areal hutan yang luas. Oleh sebab itu, izin ini seringkali dibajak oleh perusahaan kayu yang memanfaatkan izin masyarakat untuk mendapatkan akses ke kayu gelondongan, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi yang tak terkendali, pembalakan liar dan skema penyelundupan kayu terbesar di dunia. Izin IPKMA akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2005 sebagai jawaban atas pembalakan liar yang tak terkendali dan sekarang masyarakat Papua tidak mempunyai hak legal untuk memanen atau mendapatkan keuntungan dari kayu gelondongan yang berada di atas lahan mereka. Tindakan seorang warga Papua yang menebang pohon yang berada di lahannya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini mendorong mereka untuk memasok kayu ke pabrik penggergajian dengan harga rendah dan mereka juga rentan terhadap tuntutan suap dari seorang pejabat yang menancam mereka. Sebenarnya kebijakan ini masih dapat disebut sebuah kebijakan yang tepat apabila izin ini dirancang pada skala yang tepat dan masyarakat dibantu dan dipandu secara efektif dalam pelaksanaannya, sehingga warga Papua dapat menggu-

nakan Hutan Kemasyarakatan sebagai sumber penghidupan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hutan Kemasyarakatan yang legal yang dirancang dan dikelola dengan baik akan dapat berperan besar dalam mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua dibandingkan dengan perluasan perkebunan dalam skala besar yang dilakukan saat ini.

Perkebunan Skala Kecil

Setelah mengikuti proyek-proyek pembangunan yang sebelumnya, masyarakat Papua telah mendapatkan pengalaman yang berharga dalam pembudi-dayaan dan memperoleh keuntungan dari perkebunan tanaman coklat. Masyarakat Papua menyatakan bahwa penanaman coklat sesuai dengan budaya mereka dibandingkan dengan pembudi-dayaan kelapa sawit dimana mereka tidak mempunyai pengalaman. Hal ini tampak dalam beberapa kasus dimana masyarakat Papua berusaha membudi-dayakan tanaman coklat dalam skala kecil pada lahan-lahan yang kemudian diserahkan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang kemudian ditanami kelapa sawit.

Kegiatan lainnya pada tingkat masyarakat adalah peternak mutiara, perikanan dan wisata hutan (ecotourism) telah ditawarkan sebagai sumber penghasilan yang sesuai untuk Papua dan masyarakat Papua. Walaupun demikian sampai saat ini usulan-usulan ini dikesampingkan karena eksploitasi dalam skala industri dianggap lebih menarik. Wisatawan sampai saat ini tidak dianjurkan untuk berkunjung ke Papua.

Kerangka Kerja REDD

Upaya untuk menahan laju deforestasi telah beralih menuju semacam mekanisme untuk mengurangi emisi yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Walaupun kerangka kerja peraturan untuk skema ini belum final, REDD menawarkan sebuah alternatif yang menarik dibanding dengan deforestasi yang terencana di Papua dan juga menawarkan sesuatu yang akan memberi manfaat pada masyarakat setempat. Karena itu perlu diperhatikan bahwa skema REDD didasarkan pada hak adat atastanah, persetujuan masyarakat dan pembagian pendapatan yang adil.



© EIA/Telapak



© EIA/Telapak



© EIA/Telapak



REKOMENDASI

ABOVE:

Without remedial action, millions of hectares of Papua's frontier forests will be converted to plantations over the next decade, as above in Sorong.

Apa yang terjadi di Papua adalah perampasan lahan dalam skala besar-besaran. Setidaknya lima juta hektar lahan dimana sebagian besar masih berupa hutan ditargetkan oleh para konglomerat yang berkuasa dan didukung oleh investor asing yang tidak jelas, yang kadang-kadang terdaftar di kawasan bebas pajak di luar negeri (offshore taxhavens) yang penuh rahasia. Perkembangan pesat sektor perkebunan ini juga didukung oleh pejabat-pejabat dari berbagai tingkatan yang mengatas-namakan pembangunan untuk masyarakat Papua dan anggapan bahwa perubahan iklim dapat diatasi hanya dengan penggunaan bahan bakar nabati.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Telapak/EIA menunjukkan perkebunan yang telah beroperasi gagal memenuhi janjinya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Sebaliknya malah keberadaan perkebunan hanya mewariskan konflik antara masyarakat yang terkena dampak dengan perusahaan perkebunan, eksploitasi yang tak terkendali dan kekecewaan yang mendalam. Penerima manfaat sesungguhnya tinggal jauh dari Papua; di tengah gemerlapnya pencakar langit di Jakarta dan ruang rapat di Hong Kong dan sentra keuangan dunia lainnya.

Penghancuran terencana terhadap jutaan hektar hutan Papua menyebabkan implikasi yang serius terhadap upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Potensi manfaat dari penggunaan bahan bakar nabati dikecilkan oleh emisi rumah kaca yang dihasilkan oleh penggantian hutan yang lebat dengan tanaman monokultur seperti kelapa sawit.

PEMERINTAH INDONESIA HARUS:

- Menghentikan pemberian izin pembukaan perkebunan baru, sampai diadakannya sebuah pengkajian yang transparan dan menyeluruh akan dampak yang mungkin terjadi
- Menyebarkan informasi mengenai semua izin perkebunan yang dikeluarkan di Papua
- Memastikan implementasi penuh dari peraturan otonomi khusus yang menjelaskan dan memformalkan kepastian tenurial tanah dan Sumber Daya Alam
- Menetapkan tata cara dan kompensasi yang adil dan mengikat perusahaan

perkebunan dalam merundingkan penggunaan lahan dengan masyarakat setempat

- Memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi agar melakukan penyelidikan terhadap pemberian izin perkebunan yang mencurigakan, terutama di Merauke dan Sorong
- Menyelidiki kasus-kasus dimana kegiatan perkebunan telah dimulai sebelum izin yang diperlukan diperoleh
- Mendorong penyebaran-luasan pengelolaan hutan berbasis rakyat di Papua
- Memusatkan program pembangunan pada pendidikan yang lebih baik, pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Papua sebelum mengeksploitasi Sumber Daya Alamnya

KOMUNITAS INTERNASIONAL HARUS:

- Memastikan perjanjian internasional tidak mengandung insentif bagi pengalihan fungsi hutan untuk memproduksi bahan bakar nabati dan memastikan agar skema kerangka kerja REDD menjamin hak-hak masyarakat adat
- Memastikan bahwa Papua mendapatkan prioritas utama dalam bantuan pembangunan untuk mengatasi masalah kemiskinan, menjamin sumber mata pencaharian di pedesaan yang berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon yang diakibatkan oleh deforestasi di Indonesia
- Melakukan penilaian terhadap peran dari tuntutan global terhadap komoditas pertanian dan bahan bakar nabati seperti misalnya kelapa sawit dalam mendorong terjadinya deforestasi dan mengembangkan standar yang berkelanjutan yang mengikat untuk komoditas-komoditas tersebut

COMPANIES SHOULD:

- Menghindari pembelian minyak kelapa sawit atau produk pertanian lainnya dari perusahaan yang beroperasi di Papua sampai sebuah kajian yang menyeluruh dan transparan mengenai dampak sosial dan lingkungan yang mereka akibatkan telah dilakukan dan langkah-langkah perbaikan juga telah dilakukan.

REFERENSI

- Paparan oleh Barnabus Suebu, Gubernur Propinsi Papua di http://www.climatechange.ca.gov/forestry_task_force/documents/belem/Papua_Belem_Presentation.pdf
- The Stern Review on the Economics of Climate Change, Tambahan 7.f, http://www.hm.treasury.gov.uk/d/annex7f_land_use.pdf.
- Houghton 2003, dikutip dalam Baumer et al. 2005, dikutip dalam Indonesia dan Climate Change: Working Paper on Current Status & Policies, A Sari et al, World Bank, PEACE & DFID, Maret 2007.
- The Economics of Climate Change in Southeast Asia, Asian Development Bank, April 2009. (Perekonomian dan Perubahan Iklim di Asia Tenggara, Bank Pembangunan Asia)
- Climate Change Vulnerability for SE Asia, Environment and Economy Programme for Southeast Asia, 2009.
- Indonesia and Climate Change: Working Paper on Current Status & Policies, A Sari et al, World Bank, PEACE & DFID, Maret 2007.
- Towards Sustainable Production and Use of Resources: Assessing Biofuels: United Nations Environment Program (UNEP), October 2009.
- Government Calls for Help with Emission Cuts, Jakarta Post, 27 Agustus 2009.
- Dewi, S., Khasanah, N., Rahayu, S., Ekadinata A., dan van Noordwijk, M. 2009. Carbon Footprint of Indonesian Palm Oil Production: a Pilot Study. Bogor, Indonesia, World Agroforestry Centre - ICRAF, Kantor Regional SEA.
- Papuan Demand No New Forestry or Plantation Deals until Special Autonomy Regulations Protect Indigenous Rights and Interests, EIA/Telapak/Foker LSM Papua Press Release, Jakarta, 25 Juni 2008, terdapat di: <http://www.eia-international.org/cgi/news/news.cgi?template=462>
- EIA/Telapak, The Thousand Headed Snake (Ular Berkepala Seribu), 2007.
- The Last Frontier, Illegal logging in Papua and China's Massive Timber Theft, EIA/Telapak, 2005.
- Korupsi dan pendapatan dari hutan di Papua (Corruption and forest revenues in Papua), Anti-Corruption Resource Centre, Bambang Setiono, Juni 2008. Terdapat di www.u4.no/themes/natural-resources
- A Backwards Step, how demand for merbau timber is undermining Indonesia's anti-pembalakan liar policies, EIA/Telapak, 28 Agustus 2008.
- Data Ekspor dari BRIK, 19 Januari 2009; Data Produksi dari Departemen Kehutanan terdapat di: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/PH/BPK/ALAM/Produksi_Mei07.pdf dan http://www.dephut.go.id/files/DataRelease_BPK08_0.pdf
- A who's who of Indonesian biofuel, Bill Guerin, Asia Times, 22 Mei 2007.
- The Final Cut: Illegal logging in Indonesia's Orangutan Parks, EIA/Telapak, Agustus 1999.
- Staran Press EIA, Tanggal 6 Mei 2008.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007.
- Instruksi Presiden No. 5, Tahun 2007.
- Indonesia looks to Papua to expand palm oil plantations: official, AFP, 21 Mei 2008.
- Mobilitas dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Indonesia, Riwanto Tirtosudarmo, UNDP, Juni 2009, mengutip data dari Central Council of Statistics yang terdapat di <http://www.bps.go.id/sector/ipm/table1.shtml>
- Papua Needs Assessment, An Overview of Findings and Implications for the Programming of Development Assistance, UNDP, August 2005.
- Health and human security in West Papua, Medical Journal of Australia, Rees et al, 20 Oktober 2008. Terdapat di http://www.mja.com.au/public/issues/189_11_012008/ree10420_fm.html
- Tussle for Papua's forests, John McBeth, The Straits Times (Singapore), 21 Agustus 2007.
- Transparency International 2009 Global Corruption Report, dikutip di: Most business players pay bribes: Survey, The Jakarta Post, 8 Oktober 2009.
- Peta Jalan di Papua, Halaman17, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2008.
- Papua governments blew Rp 30 t on special autonomy: Official, Andi Hajramurni, The Jakarta Post, 9 September 2009.
- Agriculture and Development in Eastern Indonesia: Agriculture Sector Strategy Review. Ministry of Agriculture, March 1998: <http://www.adb.org/Documents/Reports/Consultant/29316-INO/29316-05-INO-TACR.pdf>
- Deklarasi Para Gubernur Aceh, Papua dan Papua Barat tentang Perubahan Iklim, Nusa Dua, Bali, 26 April 2007.
- Dari Hutan untuk Kematian menuju Hutan untuk Kehidupan: Kebijakan Baru untuk Manajemen Kelestarian Hutan di Papua (From Forests for Death to Forest for Life: The New Policy for Sustainable Forest Management in Papua), Barnabas Suebu, Governor of Papua Province, Desember 2007.
- Papua to Assess Carbon Stocks, Jakarta Post, 14 Mei 2008.
- Hanya 10 Perkebunan Mampu Bertahan di Papua, Papua Pos, 26 Februari 2009.
- Study Kelayakan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT. Henrison Inti Persada, Papua. By I Wayan Budiarta, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia. Ada di [http://docs.google.com/gview?as=v&q=cache:q02Ehcs4NuAJ:ejournal.unud.ac.id/abs/trak/\(4\)%2520soca-budiasa-kelayakan%2520kela-pa%2520sawit\(1\).pdf+%22henrison+inti+persa-da%22&hl=en](http://docs.google.com/gview?as=v&q=cache:q02Ehcs4NuAJ:ejournal.unud.ac.id/abs/trak/(4)%2520soca-budiasa-kelayakan%2520kela-pa%2520sawit(1).pdf+%22henrison+inti+persa-da%22&hl=en)
- Kejahatan Trans-Nasional dari Pembalakan Liar, Halaman 6, Suropto, Anggota dari Komisi I, Republik Indonesia, dipresentasikan di EIA/Telapak workshop "Violence in The Forest", Hotel Atlet Century Jakarta, 18 & 19 September 2006.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 409/Menhut-II/2006.
- Surat Dinas No., S.681/MENHUT VI/2006, tanggal 1 Nopember 2006, dari Menteri Kehutanan, M S Kaban, untuk Greenpeace SEAs forest campaigner.
- Airmata dari ibu Mooi (Tears of Mother Mooi), sebuah filem dari PT Triton, dikeluarkan Nopember 2007, tersedia di http://www.eia-international.org/visual_media/footeage/
- Keputusan Direktur Jenderal dari Hutan Produksi - Departemen Kehutanan, SK. No 292/VI-BPH/2007, 28 Desember 2007.
- Map of Signed Maps on file with EIA.
- Photograph of Wall Mounted Information Table, di Pameran Pembangunan Kabupaten Sorong di AIMAS, PT. Triton, diterima bulan September 2009.
- PetroChina ingatkan PT Inti Kebun Sejahtera, Fajar Papua 9/20/2008 <http://www.fpnewssrg.co.cc/2008/09/ptochina-ingatkan-pt-inti-kebun.html>, & Perbaiki Jalan, PetroChina dan PT Inti Kebun Sejahtera Miskin MOU, Fajar Papua 9/20/2008; <http://www.fpnewssrg.co.cc/2008/09/perbaiki-jalan-ptochina-dan-pt-inti.html>
- Indonesia's Medco eyes food crop, biofuel projects in Papua, 2 Juli 2009, Reuters
- PENYUSUNAN RENCANA DETAIL KAWASAN AGROPOLITAN KAB. MANOKWARI.
- Keputusan Gubernur No: 238, tahun 2008 terdapat di <http://apindo.or.id/images/res/UMP%202009%20Up%20Date%2014%20Januari%202009.pdf>
- Pertama menanam, untung nanti : Minyak Sawit masih atraktif sekali-pun harga jatun ("Plant first, profit later: Palm oil is still attractive although its price has tumbled" - Muchamad Nafi, Tempo, No. 52/VIII/26 Aug - 01 Sept 2008, dimuat ulang di AsiaViews, Edition: 31/V/August/2008 terdapat di <http://new.asiaviews.org/?content=53g3gf545h5686h&onbusiness=20080829001329>
- OFFER INFORMATION STATEMENT DATED 29 JUNE 2009 (Lodged with the Monetary Authority of Singapore on 29 June 2009), GOLDEN AGRICULTURE RESOURCES LTD.
- http://appmnr.app.co.id/env_app-mr_tst/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Arumor-mill-2&catid=39%3A biodiversitas-and-conservation&Itemid=41&lang=
- NGOs plan to sue the police for closing cases, Eyes on the Forest (EoF), 24th December 2008)
- Pembukaan Hutan APP berkaitan dengan 12 tahun kematian manusia dan harimau di Sumatra (APP's forest clearing linked to 12 years of human and tiger deaths in Sumatra), WWF, 17 Maret 2009
- Sinar Mas Akan Buka Lahan Kelapa Sawit 1 Juta Ha, 21 Maret 2007, Website Pemerintah Propinsi Papua
- 5 Film Sinar Mas dalam file dengan EIA.
- Presentasi Sinar Mas: Pre-Planning Workshop - Papua Program, 16 Februari 2007, dan Sinar Mas commissioned maps of these concessions, dalam file dengan EIA.
- OFFER INFORMATION STATEMENT DATED 29 JUNE 2009 (Lodged with the Monetary Authority of Singapore on 29 June 2009), GOLDEN AGRICULTURE RESOURCES LTD.
- Lihat No. 54
- Five Indonesians shine on 'Forbes' billionaire list, Lilian Budiarto, Jakarta Post, 03/13/2009.
- Laporan Dampak Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Perbatasan RI-PNG, Propinsi Papua, oleh Augustine. P. F. Kres, S.Si. - Kepala Suku Besar Distrik Arso Timur, Keerom (Head of the large tribe in Arso Timur District, Keerom), 18 April 2009.
- Filem Foker LSM Papua: Janji untuk Sejahtera (A promise of Welfare), Juni 2008.
- PT Rajawali Tidak Tepat Janji, Warga Yetti Palang Lahan Kelapa Sawit, KPKC JPIC.
- Lihat No. 59
- http://www.unqlobalcompact.org/data/unqc_cops_resources/A573CIDD-46E9-490D-993D-69C22A4F43FA/COP.pdf
- Biro Promosi dan Investasi Merauke (Merauke's Agency of Investment Promotion), Pebruari 2008.
- Investasi dari Medco sebesar US\$ 600 Juta di Industri Pengolahan Kayu, (Medco Invests US\$600 Million in Processed Timber Plant), Bisnis Indonesia, 27 Nopember 2007.
- Gambaran dari Presentasi Marthen Kayoi, Kepala Wilayah Kehutanan Propinsi Papua tanggal 20 Maret 2007.
- Izin No. 522.2/3574 Badan Promosi dan Investasi Daerah - Pemerintah Kabupaten Merauke / Promotion and Investment Agency - district of Merauke Government.
- Medco Papua Lestari Bebaskan Lahan 2.800 Ha Secara Adat, 19 Februari 2008, terdapat di <http://www.cenderawasinpos.com/detail.php?id=11674&ses=>
- The Release of Customary Land for Investor Violates Customary Procedures, Foker LSM Papua, 17 April 2008
- LG INTL SECURES FORESTATION LAND IN INDONESIA, Seung-chul Park, 8 Oktober 2009, terdapat di <http://research.scottrade.com/public/markets/news/news.asp?dockKey=100-273c9955-1§ion=headlines>
- LG International to Operate Afforestation Business in Indonesia, Maeil Business Newspaper & mk.co.kr, Seung-chul Park, 29 September 2009.
- Binladin Freezes Plans to Invest in Local Rice, Mita Valina Liem, Jakarta Globe, 4 Maret, 2009.
- Power plays in the slicing of Indonesian Papua, John McBeth, Senior Writer, The Straits Times, 17 Maret 2008.
- EIA/Telapak Perjalanan Dinas Lapangan, Nopember 2007.
- Ketika Acungan Senjata Ikut Berdagang : Keterlibatan Bisnis Pihak Militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso) Komisi Penghilangan Manusia dan Korban Kekerasan (When Gun Point Joins the Trade: Military Business Involvement in Bojonegoro, Boven Digoel and Poso, Commission for Disappearances and Victims of Violence (KONTRAS), 2004.
- Indonesian Papua: A Local Perspective on the Conflict, Asia Briefing N+66, Crisis Group International, 19 Juli 2007.
- CCT Resources Holding Limited - Laporan Tahunan 2008 / 2009, dapat dilihat di <http://www.hkxnews.hk/listedco/listconews/gem/20090629/GLN20090629047.pdf>
- 29 Mei 2008 Edaran - "Very Substantial Acquisition of a Forestry Project in Papua, Indonesia with Natural Forest Concession of 313,500 Hectares And Connected Transaction" - Issued by Tradeeasy Holding Limited., (since remanded to CCT Resources Holding Limited.), Page 14, & http://www.tradeeasy.com/te/document/investor%20relation%20press/ew08163_circular_300508-20080529175854958.pdf
- HK ICRIS - Integrated Companies Registry Information System terdapat di <http://www.icris.cr.gov.hk/csci/>
- <http://realblog.zkiz.com/greatsoup/10365>
- CCT Resources website: cct-resources.com
- Lihat 76
- Dua Perusahaan Perkebunan Ekspansi ke Timika, (Two Plantation Companies Expand to Timika) in Radar Timika, 10 Juli 2009.
- CCT Resources Holding Limited - Laporan Kwartal I tahun 2009.
- Papua to Assess Carbon Potentials, Nethy Dharma Somba, Jakarta Post, 14 Mei 2008.
- Investor Biofuel Incar Papua, 26 Juli 2008, Tribun Pontianak dapat dilihat di [HTTP://TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/READ/ARTIKEL/1345](http://tribunpontianak.co.id/READ/ARTIKEL/1345)
- Pers Comm, Yoset Ardi, 30 September 2009

ENVIRONMENTAL INVESTIGATION AGENCY (EIA)

62/63 Upper Street
London N1 0NY, UK
Tel: +44 (0) 20 7354 7960
Fax: +44 (0) 20 7354 7961
email: ukinfo@eia-international.org

www.eia-international.org



EIA US

P.O.Box 53343
Washington DC 20009 USA
Tel: +1 202 483 6621
Fax: +202 986 8626
email: usinfo@eia-international.org

TELAPAK

Jalan Pajajaran No. 54
Bogor, Indonesia
Tel: +62 251 393 245 /715 9909
Fax: +62 251 393 246
telapak@telapak.org

www.telapak.org

